

buletin lpp sinode

*sarana komunikasi dan informasi pembinaan dan pengaderan warga gereja
Sinode GKJ & GKI SW Jateng*

No. 41 Desember 2018

GEREJA PEDULI KEBANGSAAN INDONESIA

Diterbitkan oleh:
Lembaga Pembinaan dan Pengaderan
Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa
Gereja Kristen Indonesia SW Jateng

Buletin LPP Sinode**No. 41
(2018)**

Diterbitkan oleh:
LPP Sinode GKJ dan GKI SW Jateng
Samironobaru No. 77
Kompleks LPPS
Yogyakarta

Telp. 0274 514721

Fax. 0274 543001

Email:

sekretariatlppsinode@gmail.com

Rek. BCA Gejayan

a.n. Dra. Bening Hadilinatih

No. 4560810836

Redaktur Pelaksana

Koordinator:

Pdt. Murtini Hehanussa

Anggota:

Pdt. Wisnu Saptanugroho

Pdt. Addi S. Patriabara

DAFTAR ISI

Daftar Isi ii

Editorial iii

Gereja Peduli KDRT..... 1

“Demokrasi dan
Sentimentalitas” 12

Informasi Pelaksanaan
Program Pembinaan dan
Pengaderan
LPP Sinode tahun 2018 37

Informasi Rencana
Program Pembinaan dan
Pengaderan
LPP Sinode 2019 44

Para Pelayan Tuhan
di LPP Sinode GKJ dan
GKI SW 47

Informasi Wisma
LPP Sinode 51



EDITORIAL

Sahabat LPP Sinode yang terkasih,

Selamat Natal 2018 dan Selamat Tahun Baru 2019! Dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kami mempersembahkan Buletin LPP Sinode bagi Anda. Buletin nomor 41 tahun 2018 ini mengambil tema “Gereja Peduli Kebangsaan Indonesia”. Tema ini sengaja dipilih karena kepedulian LPP Sinode terhadap situasi kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Kebangsaan kita sebagai orang-orang yang dari dahulu kala, dari zaman nenek moyang, hidup bersama dengan rukun beberapa tahun belakangan ini dirusak oleh kelompok orang yang memaksakan agama beserta budayanya. Mereka ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi mereka. Ini adalah situasi genting yang harus dijawab oleh gereja!

Untuk itu LPP Sinode secara terus-menerus berupaya untuk mengajak gereja-gereja/jemaat-jemaat peduli terhadap kebangsaan Indonesia. Beberapa program yang ditahun 2018 telah dilaksanakan LPP Sinode menunjukkan kepedulian tersebut. Misalnya program Kursus Pancasila, Telaah Buku dengan judul „Demokrasi dan Sentimentalitas“, Buku Masa Adven Natal 2018 dengan tema „Damai Sejahtera di Bumi Pancasila“, sampai kepada persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun sayang seribu sayang, kursus Pancasila dan Telaah Buku tersebut kurang diminati oleh gereja/jemaat. Tema Buku Masa Adven Natal juga mendapat tentangan dari beberapa kalangan. Sayang seribu sayang, kegentingan kondisi kebangsaan kita ini nampaknya belum ditangkap oleh semua elemen gereja/jemaat.

Kami berharap melalui buletin ini, kita diingatkan kembali kepada kebangsaan kita yang begitu kompleks. Tidak hanya

meliputi relasi antar anak bangsa yang multikultur, namun juga relasi dalam keluarga. Bangsa ini bisa tegak berdiri ketika tiap keluarga di negeri ini juga bisa tegak berdiri. Oleh karena itu, bagian awal dari Buletin ini diisi dengan artikel kompilasi dua materi yang disajikan dalam Studi PWG yang bertema „Gereja Peduli KDRT“, yang diselenggarakan oleh LPP Sinode pada tanggal 24 November 2018. Selanjutnya, disajikan pula materi Telaah Buku dengan judul „Demokrasi dan Sentimentalitas, Dari “Bangsa Setan-Setan”, Radikalisme Agama, Sampai Post Sekularisasi.

Pada akhirnya perkenankanlah kami juga menyajikan kolom perkenalan dengan para pelayan Tuhan di LPP Sinode, informasi pelayanan yang telah dilakukan oleh LPP Sinode di tahun 2018, demikian juga rencana program tahun 2019. Kiranya informasi ini berguna bagi para Sahabat LPP Sinode dalam ikut ambil bagian dalam program-program tersebut, baik sebagai peserta program maupun sebagai donatur bagi gereja/jemaat yang ingin ikut program-program tersebut tetapi tidak mempunyai dana untuk membayar biaya kontribusi program. Untuk membantu gereja/jemaat yang kurang mampu tersebut, kami membuka kesempatan bagi Ibu/Bapak/Saudara untuk ikut ambil bagian dalam **“*Sister Church Program: Training and Development for All*”** melalui rekening kami:

Rek. BRI Tiro no. 0029-01-000409-30-9 a.n. LPP Sinode
Rek. BCA no. 4560810836 a.n. Dra. Bening Hadilinatih

Jika Ibu/Bapak/Saudara berminat untuk mengikuti program-program pembinaan dan pengaderan yang diselenggarakan di tahun 2019, silakan menghubungi alamat atau nomor telepon yang dicantumkan dalam kolom tersebut.

Akhir kata, selamat membaca, selamat bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan memberkati.

Yogyakarta, Desember 2018
Salam hangat dari kami,

Pdt. Wisnu Sapto Nugroho
Pdt. Addi Soselia Patriabara
Pdt. Murtini Hehanussa



GEREJA PEDULI KDRT

[Kompilasi dua materi Studi PWG „Gereja Peduli KDRT”
yang diselenggarakan di LPP Sinode, Sabtu 24 November 2018.
Kompilasi oleh Pdt. Murtini Hehanussa]

Materi yang dikompilasi:

- 1. Materi dari Arnita Ernauli Marbun, praktisi di Rifka Annisa Women Crisis Center, aktivis GKJ Ambarukmo Yogyakarta.*
- 2. Pdt. Murtini Hehanussa, LPP Sinode GKJ & GKI SW Jateng, aktivis perempuan*

Fakta KDRT

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) seakan menjadi persoalan yang jauh dari gereja. Seakan gereja hendak mengatakan bahwa KDRT tidak terjadi dalam kehidupan jemaat. Namun pada kenyataannya ada saja persoalan KDRT dalam kehidupan keluarga Kristen. Kasus-kasus yang dilaporkan ke Rifka Annisa (Sdri. Arnita) juga tidak jarang datang dari kalangan keluarga Kristen, bahkan dari kalangan majelis gereja/jemaat. Informasi-informasi yang diterima oleh Pdt. Murtini di acara sarasehan KDRT di sebuah gereja di Ajibarang dan sharing di sebuah gereja di Purwokerto juga menunjukkan bahwa ada kasus-kasus KDRT yang sebetulnya ada namun tidak terekspose. Ini terjadi karena orang malu untuk menyampaikan kasus-kasus tersebut. Kasus KDRT dianggap sebagai aib keluarga yang mesti ditutupi dan tabu untuk diceritakan kepada orang lain.

Informasi tentang realitas adanya kasus-kasus KDRT di lingkungan keluarga Kristen juga disampaikan oleh beberapa orang peserta acara Studi PWG „Peduli KDRT” yang diselenggarakan oleh LPP Sinode pada tanggal 24 November 2018. Para peserta tersebut ada yang mengalami sendiri sebagai penyintas KDRT, ada juga yang menceritakan kejadian KDRT yang dialami oleh suaminya sewaktu kecil dan tetangganya. Informasi tentang realitas KDRT tersebut semakin kuat ketika peserta diajak untuk melihat hasil

penelitian mahasiswa psikologi Universitas Indonesia yang meneliti kasus KDRT di sebuah gereja.¹

Dari hasil studi penelitian tersebut ditemukan:

1. Perlakuan kekerasan secara fisik, psikologi, ekonomi dan seksual masing-masing kasus memiliki kekhasannya tersendiri. Pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus tersebut pun berbeda-beda, tergantung dari sifat dan perangai masing-masing korban.
2. Perempuan-perempuan yang mengalami KDRT memiliki **sikap** yang sama untuk menolak kekerasan itu, namun tidak sama dalam hal tindakan yang diambil: ada yang bercerai, ada yang bertahan, dan ada yang berpisah tetapi tidak bercerai.
3. Perhatian Gereja terhadap perempuan-perempuan korban tindak kekerasan tersebut belum memadai dan optimal. Gereja belum terlalu mempedulikan kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga Kristen. Sebagian besar perhatiannya masih tertuju pada konseling pra nikah / bina pranikah.
4. Kesetaraannya dengan laki-laki tidak menjadi jaminan perempuan tidak mengalami tindak kekerasan. Harus diakui: banyak perempuan yang masih tetap berada di posisi subordinat.

Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Kekerasan emosional dan sosial (perilaku mengendalikan)
Perilaku ini nampak misalnya dalam bentuk:
 - Mencoba mencegah pasangan bertemu teman-teman
 - Mencoba melarang pasangan berhubungan dengan keluarga
 - Selalu ingin tahu dimana pasangan berada setiap saat
 - Mengabaikan dan acuh tak acuh terhadap pasangan
 - Marah jika pasangan berbicara dengan laki-laki lain

¹ <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-74137.pdf> diunduh tanggal 18 Desember 2018

- Sering curiga bahwa pasangan tidak setia
- Suami mengharuskan pasangan meminta izin kepadanya sebelum pemeriksaan kesehatan/ berobat
- Menghambat pasangan untuk beribadah
- Melarang/menghambat pasangan untuk mengikuti kegiatan organisasi

2. Kekerasan Fisik

Nampak dalam perilaku:

- Diancam akan menggunakan atau benar-benar menggunakan senjata tajam atau api
- Dicekik atau dibakar dengan sengaja
- Ditendang, diseret atau dihajar
- Dipukul dengan tangan atau dengan benda yang bisa menyakiti
- Didorong atau dijambak rambutnya
- Ditampar atau dilempar sesuatu yang bisa menyakiti.

Penyebab dari kekerasan fisik tersebut biasanya:

- Saat istri menolak berhubungan seks
- Persoalan makanan
- Saat suami/pasangan mabuk
- Istri dirasa tidak patuh
- Saat suami/pasangan cemburu
- Masalah dengan keluarga suami atau istri
- Saat suami/pasangan menganggur
- Saat suami menunjukkan bahwa dirinya lebih berkuasa
- Masalah keuangan
- Masalah pekerjaan.

3. Kekerasan Seksual

- Dipaksa melakukan hubungan seksual saat tidak ingin
- Menyentuh/meraba bagian tubuh responden yang dianggap sebagai tindakan yang menjurus ke arah seksual. Termasuk misalnya menyentuh/meraba payudara.

- Membuat komentar bernada seksual atau mengirim pesan seksual atau pesan facebook yang tidak diinginkan.
- Memperlihatkan gambar berbau seksual yang tidak diinginkan.

KDRT Dalam Ranah Hukum

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan (Pasal 20 UU PKDRT). Undang-undang Penghapusan KDRT (UU PKDRT) tertuang dalam UU No 23 Tahun 2004. Di dalam UU tersebut dicantumkan tentang hak-hak korban KDRT sbb.:

- Hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia.
- Hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban,
- hak menentukan keputusan sendiri,
- hak mendapat informasi,
- hak atas kerahasiaan identitasnya,
- hak atas kompensasi,
- hak atas rehabilitasi sosial,
- hak atas penanganan pengaduan,
- hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan, dan
- hak atas pendampingan.

Sedangkan hak khusus korban adalah sbb.:

- hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang,
- hak pelayanan dasar,
- hak perlindungan yang sama,
- hak dari berbagai stigma, dan
- hak mendapatkan kebebasan.

Gereja mesti peduli terhadap KDRT

Terhadap kasus-kasus KDRT tersebut, gereja tidak boleh tinggal diam! Gereja mesti peduli dan melakukan upaya-upaya

penanganan dan pencegahan. Ini penting karena KDRT bukan hanya merupakan tindakan yang berdosa karena menyakiti korban; namun juga karena KDRT juga menyebabkan dosa menjadi beranakpinak. Anak laki-laki yang menyaksikan dan mengalami kekerasan **berisiko tinggi** menjadi pelaku kekerasan. Sedangkan anak perempuan berisiko mengalami kekerasan di relasi intim masa dewasanya kelak.

Berikut ini beberapa dampak KDRT yang dialami oleh korban, anak maupun pelakunya sendiri. Dampak KDRT pada korban:

1. Fisik: gangguan kesehatan fisik, reproduksi, kecacatan, kondisi kronis, kematian.
2. Psikologis: penurunan fungsi psikologis (motivasi, emosional, kognitif), gangguan perilaku, gangguan psikologi kronis
3. Sosial : mengisolir diri, terkucil
4. Ekonomi : ketergantungan secara ekonomi, menjadi objek eksploitasi ekonomi dan tulang punggung keluarga, biaya kesehatan tahunan lebih besar (kliping Jurnal Perempuan, 2002)

Adapun dampak KDRT pada anak: anak mendapatkan lingkungan tumbuh kembang yang kurang kondusif sehingga menimbulkan berbagai hambatan psikologis: hambatan perilaku dalam bersosialisasi dengan teman sebaya, hambatan prestasi akademik, maupun berkaitan dengan perkembangan kepercayaan diri, harga diri, konsep diri, dan sebagainya.

Sedangkan dampak KDRT pada pelaku:

- Dijauhi oleh pasangan, bahkan berpisah
- Dibenci oleh anak
- Anak bermasalah dan meniru perilaku kekerasan
- Mendapatkan stigma negatif dari lingkungan
- Menanggung berbagai pembiayaan yang ditimbulkan oleh peristiwa kekerasan
- Mengalami gangguan kesehatan reproduksi
- Kondisi kesehatan secara umum terganggu
- Berurusan dengan proses hukum

Apa yang mesti dilakukan oleh gereja?

Gereja perlu terus-menerus *memberitakan tentang kasih secara konkret*. Bahwa kekerasan bisa terjadi dalam kehidupan bersama dan kekerasan tersebut bertentangan dengan kasih.

Pelayanan yang dilakukan oleh gereja/jemaat mesti pelayanan yang bersifat preventif/pencegahan maupun penanganan.

1. Tindakan pencegahan

Untuk mencegah terjadinya KDRT, maka diperlukan *Konseling Pranikah* yang juga berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, yang diselenggarakan oleh gereja bukan hanya sekadar katekisasi/bina Pranikah, namun juga dilengkapi dengan Konseling Pranikah. Konseling ini sangat penting dalam mempersiapkan calon pengantin. Oleh karena itu perlu ada kesiapan dan keterampilan dalam diri tenaga konseling untuk memahami apa dan bagaimana menghadapi kekerasan.

Konselor mesti menjelaskan dan memberikan intervensi sejak awal kalau ada tanda-tanda kekerasan. Di akhir konseling ini, konselor juga mesti mengajak peserta untuk mengambil keputusan: lanjut nikah atau tidak, apa yang perlu dilakukan jika ada tanda-tanda perilaku kekerasan, dll.

Tradisi yang mungkin perlu diciptakan adalah membuat kelas konseling pranikah untuk anak-anak muda yang berpacaran, meski belum terburu-buru menikah. Itu penting karena:

- korban kekerasan seringkali “*tidak menyadari*” bahwa ia mengalami kekerasan.
- Si pelaku sendiri kadang *tidak menyadari kecenderungan* perilaku kekerasan yang ada di dalam dirinya atau *merasa bahwa perilakunya adalah wajar*.

Oleh karena itu kedua-duanya perlu dibantu untuk menyadari potensi perilaku kekerasan yang ada di dalam diri mereka.

Kepada pra calon / pasangan perlu diajarkan bahwa kehidupan pernikahan itu seperti TEAM:

Togetherness (1 Kor. 7:5)

Empowerment (Efesus 5:33)

Accountability (Filipi 3:19-20)

Mentoring (Filipi 4:5-6) – *Pengasuhan & pembimbingan*
(Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh)

2. Tindakan Penanganan

Yang bisa dikerjakan gereja adalah peduli terhadap kehidupan umat. Ketika disinyalir ada gejala-gejala KDRT atau ketika ada yang datang untuk berkonsultasi, maka gereja harus mengerjakan pelayanan konseling pastoral dengan tekun dan sabar.

Baik pada tahap preventif maupun kuratif, gereja diharapkan dapat tetap mengasihi korban dan pelaku untuk mendapatkan penguatan dan penyembuhan dalam rangka memutuskan rantai kekerasan di masa depan melalui konseling pastoral dan upaya-upaya yang bisa dilakukan (dengan bantuan psikolog, psikiater, dll.). Gereja mesti membantu para pelaku kekerasan untuk sembuh dari tindakan kekerasan. Bisa jadi mereka ingin sembuh namun tidak tahu cara berhenti dan keluar dari rantai kekerasan yang menjerat mereka.

Upaya penanganan ini seringkali tidak mudah dilakukan karena warga gereja / orang mengalami KDRT seringkali beranggapan bahwa yang mereka alami adalah sebuah 'aib' keluarga. Akibatnya: mereka cenderung di DIAM/TIDAK MAU BERCERITA.

Selain upaya-upaya tersebut, gereja juga perlu menciptakan komunitas yang menghidupi kasih persaudaraan sebagai keluarga Allah dan terus menghidupi spiritualitas yang benar. Harapannya, korban mau terbuka dan dibantu dalam menyelesaikan persoalan.

Komunitas gereja (wilayah, blok, dll.) mesti menjadi komunitas yang SIAGA ATASI KDRT. Yaitu **siaga untuk peduli terhadap gejala/perilaku KDRT; siaga untuk memberi bantuan** terhadap kasus-kasus KDRT; dan **siaga untuk tetap mengasihi**, merangkul dan terus mendoakan, baik pihak korban maupun pelaku KDRT.

Adapun bantuan yang dimaksud bisa dalam bentuk intervensi (jika mampu), atau menyampaikan kepada pihak gereja yang berwenang (pendeta, pengurus/majelis wilayah/blok); dan juga tentu membantu dalam doa dan hal-hal lain (materi, perlindungan, dll.). Jadi, komunitas gereja/jemaat harus berusaha untuk tidak membenci dan tidak mengucilkan pelaku kekerasan. Mesti dihayati bahwa mereka adalah saudara/i kita yang justru perlu mendapat perhatian khusus dari kita. Mereka seperti itu bukan karena ansih keinginan mereka tetapi “bentukan masa lalu”. Kalau bukan kita yang membantu “kesembuhan” mereka, siapa lagi??

Kepada para pelaku, gereja mesti mendampingi mereka agar:

- Mereka tidak terus-menerus terjebak dalam dosa ini.
- Mereka dapat menerima penyembuhan, mau mengakui dosa dan permasalahan mereka, serta membiarkan Tuhan menyembuhkan mereka.

Rifka Annisa dan lembaga sejenis dalam karya-karyanya telah berhasil menolong banyak pelaku kekerasan bertobat dan justru menjadi pejuang untuk melawan Kekerasan. Para laki-laki yang sudah bertobat tersebut berkumpul bersama dalam Aliansi Laki-laki Baru (ALB). Mereka kebanyakan bukan orang-orang Kristen. Kalau mereka bisa, mestinya orang-orang Kristen juga bisa.

Sedangkan bagi korban kekerasan, gereja mesti mengajak:

- Bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan mereka. Dia tahu kesakitan mereka dan Dia punya rencana yang sempurna untuk menyembuhkan dan memperbaiki hidup mereka.

- Bersabar dalam proses pemulihan pasangannya sambil terus berdoa untuk pasangan dan mengasihinya. Jangan biarkan diri tenggelam di dalam persoalan.
- Minta Tuhan untuk menguatkan mereka dalam menghadapi masalah mereka.
- Meminta Tuhan untuk memberi anugerah mampu mengampuni dan mengasihi pasangannya.
- Ketika mereka sudah mengampuni, ajaklah mereka untuk meminta Tuhan agar mendapatkan kehidupan yang indah dalam Tuhan Yesus yang telah Dia sediakan (Yohanes 10:10).

Selain upaya-upaya tersebut, gereja/jemaat di dalam karya pelayanannya:

- mesti bicara tentang ancaman perilaku kekerasan yang bisa ada dalam hidup umat (di dalam warta jemaat, PA, khotbah, dll.)
- Perlu ada ibadah-ibadah reflektif dalam bulan keluarga. Ibadah ini bisa memanfaatkan keterampilan *Geopolitic counselling*, dimana umat diajak untuk lepas dari trauma masa lalu yang menyebabkan munculnya kekerasan.

Tambahan:

Pelayanan Gereja Dalam Mencegah & Menangani KDRT Terhadap Anak

Orangtua/siapaapun yang melakukan KDRT terhadap anak biasanya merupakan korban dari kekerasan itu sendiri di masa kecil mereka. Mereka trauma/dihantui oleh kebencian masa lalu, yang sadar ataupun tidak, membuatnya melakukan hal yang sama. Bahkan orangtua yang begitu baik, sesekali bisa kehilangan kontrol, frustrasi dengan tindakan sang anak. Atau mereka terlalu frustrasi terhadap diri sendiri/stress dan melampiaskannya kepada anak.

Sayangnya, seringkali orang mencari pembenaran KDRT terhadap anak dari dalam Alkitab:

“Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanyapun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu” (Amsal 22:6).

“Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu dari padanya” (Amsal 22:15).

Teks-teks Alkitab tersebut seringkali dipahami secara keliru. Yaitu sebagai hak penuh atas anak mereka. Teks Alkitab tersebut bukan merupakan izin bagi para orangtua agar bisa melakukan tindakan kekerasan. Para orangtua perlu mendidik anak mereka, tapi mereka harus memerhatikan emosi dan tindakan mereka. Anak-anak sesungguhnya adalah milik Tuhan yang ditiptkan kepada orangtua. Oleh karena itu, Teks Alkitab Efesus 6:4 perlu dicamkan: “Dan kamu, Bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan”. Juga Kolose 3:12: “Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemahlembutan dan kesabaran”.

Untuk penanganan KDRT pada anak maka perlu dilakukan konseling pastoral baik kepada anak maupun orangtua yang melakukan KDRT.

Catatan

UU PKDRT juga menyebutkan tentang peran rohaniwan (baca: juga Gereja) yang bisa dilakukan dlm rangka mengimplementasikan Mandat UU PKDRT. Yaitu:

1. Perlindungan sementara bagi korban: kepolisian dapat bekerja sama dengan pembimbing rohani (*Pasal 17*). Oleh karena itu, gereja mesti terbuka dan siap sedia untuk melindungi korban.
2. Pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban (*Pasal 24*). Oleh karena itu gereja harus mengetahui hak, kewajiban dan perlindungan bagi korban.
3. Pembimbing rohani “harus” siap mendapat dan/atau memperoleh surat perintah perlindungan baik dari pengadilan atau kepolisian maupun lembaga lain demi

perlindungan bagi korban (*Pasal 29*). Oleh karena itu, gereja mesti siap berperan aktif dan merespon positif jika ada permohonan/ surat perintah perlindungan tersebut.



Telaah Buku LPP Sinode

DEMOKRASI dan SENTIMENTALITAS



Dari "Bangsa Setan-setan", Radikalisme Agama, sampai Post-Sekularisme

F. Budi Hardiman

- Judul Buku : Demokrasi dan Sentimentalitas, Dari "Bangsa Setan-Setan", Radikalisme Agama, Sampai Post Sekularisasi
- Penulis : Dr. Franky Budi Hardiman
- Penerbit : Kanisius – Jogjakarta
- Tahun Terbit: 2018
- Halaman : 304 halaman
- Penelaah : Wisnu Spto Nugroho

Pengantar

Buku di tangan Anda ini adalah buku filsafat tulisan F. Budi Hardiman. Beliau adalah pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta dan di Universitas Pelita Harapan. Karena latar belakang beliau sebagai seorang ahli di bidang filsafat, maka kajian demokrasi ini dibedah dengan menggunakan sudut pandang filsafat.

Selain buku ini, Budi Hardiman sangat produktif menulis berbagai buku dan hampir semua tulisannya adalah buku-buku filsafat. Di halaman 297 buku ini Anda dapat melihat dan judul-judul buku karangan beliau.

Demokrasi dan Sentimentalitas, Dari "Bangsa Setan-Setan", Radikalisme Agama, Sampai Post Sekularisasi merupakan kumpulan dari 18 artikel. Artikel-artikel itu pernah disampaikan beliau dalam berbagai diskusi. Pada halaman 288-291 kita dapat melihat di mana saja diskusi-diskusi itu digelar. Mengingat buku ini merupakan kumpulan tulisan, maka tentu tidak menyajikan keutuhan gagasan sebagaimana di dalam sebuah monografi. Untuk menanggapi problem demokrasi dan sentimentalitas itu, ke delapanbelas tulisan dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu: *pertama*, agama atau sentimen-sentimen agama dipandang sebagai yang mengganggu netralitas prosedur demokrasi. *Kedua*, agama

bukan sekadar mengganggu netralitas prosedur, melainkan juga mengancam demokrasi pluralistik karena dipakai sebagai alat justifikasi oleh kelompok-kelompok radikal untuk melakukan aksi-aksi intoleran destruktif. *Ketiga*, agama bukan ancaman bagi demokrasi, melainkan membawa potensi kebenaran dan ditantang untuk berkontribusi dalam demokrasi (hal. 24-25).

Mengapa kita membahas demokrasi dan sentimentalitas? Dua hal ini kontradiktif. Demokrasi tidak dapat diturunkan dengan sentimentalitas karena dasarnya adalah penalaran publik. Dengan penalaran yang gigih, sentimen-sentimen dihindari sebab ketika sentimentalisme dibiarkan berada di ruang publik, watak sentimental itu menjadi problem “fairness”. Dampak *fairness* adalah kegagalan membangun *civil society*. Sentimentalitas jelas bukan sebuah keutamaan, melainkan korupsi berbahaya yang dapat mengarah pada brutalitas. Hal itu seperti pandangan Carl Gustaf Jung – sang neo psikoalanis kita menemukan bahwa sentimentalitas adalah bangunan atas yang menutupi brutalitas (hal. 9). Dengan bertambah kompleksnya masyarakat, demokrasi harus mengakomodasi berbagai orientasi nilai dalam masyarakat, sehingga menjadi “demokrasi pluralistik”, sehingga tumbuh toleransi, kebebasan, kesetaraan lahir akibat capaian rasionalitas demokrasi pluralistik. Itulah kontradiksi antara sentimentalitas dan demokrasi yang dipaparkan oleh Budi Hardiman dalam buku ini.

Dari 18 bab dalam buku ini, saya akan mencoba melakukan telaah. Di Akhir penelaahan itu saya memberikan catatan apresiatif sekaligus lontaran ide dari gagasan yang telah disampaikan oleh Budi Hardiman. Usai pemaparan hasil telaah buku ini, kita akan berdialog untuk sharing pengalaman dan merencanakan hal-hal baik bagi pengembangan demokrasi Indonesia.

Isi Buku

Pendahuluan

Indonesia merupakan negeri demokratis dengan Islam sebagai agama yang dipeluk sebagian besar warga negara. Kita patut

bersyukur bahwa ke-islaman di Indonesia adalah moderat sehingga dalam kemoderatan itu Islam dapat berjalan bersama demokrasi. Bahwa dalam perkembangan terdapat tarik-menarik ideologi dalam Islam yang menyebabkan guncangan-guncangan dalam demokrasi, hal itu sangatlah wajar. Teori pendulum bisa digunakan untuk merefleksikan gerakan-gerakan keagamaan dan persinggungannya dengan demokrasi (hal. 139). Pemikir Austria Herman Broch menulis “model region kultural” yang menyebut sejarah bergerak seperti bandul dari hipertografi atau absolutisme nilai menuju pada relativasi atau krisis nilai (dan sebaliknya).

Demokrasi memang tidak selamanya berjalan baik. Di dalam kondisi tertentu demokrasi berjalan dengan sentimentalitas. Leluhur filsafat Barat Plato memperingatkan bahaya persandingan demokrasi kerumunan dan sentimentalitas akan menumbuhkan ketidakadilan karena sentimentalitas rentan dimanipulasi. Dewasa ini kerumunan tidak hanya secara fisik sebab bermigrasi ke dunia digital, entah itu *Twitter*, *WhatsApp*, *Facebook*, *Line*, *Instagram*, dst. Sekalipun teks-teks digital itu tidak hadir secara fisik, namun dampak sentimenal yang dihasilkan bisa lebih hebat untuk menggerakkan kerumunan fisik.

Dewasa ini demokrasi seolah telah menjadi suatu keniscayaan politis bangsa-bangsa beradab. Namun ada sesuatu yang ganjil sebab demokrasi menjadi sasaran tembak dari kekuatan-kekuatan konservatif intoleran, entah itu berarti anti-Islam atau Islam radikal (hal. 11). Mereka berdemonstrasi untuk menuntut solusi demokratis, tetapi tujuannya adalah untuk mengakhiri demokrasi (hal. 12). Bila hal itu dibiarkan, terjadilah bunuh diri demokrasi terjadi.

Dalam masyarakat majemuk, radikalisme yang mengambil justifikasinya dari agama merupakan tantangan bagi masyarakat itu. Doktrin-doktrin religius yang radikal dapat segera membangkitkan sentimen-sentimen massa untuk melakukan aksi-aksi intoleran dan bahkan brutalitas (hal. 13). Istilah “eksistensialisme religius atas kekerasan” dicoba diperkenalkan untuk menjelaskan cara yang dipakai kelompok-kelompok agama garis keras itu di dalam politik demokratis.

Demokrasi seharusnya mengatasi sentimentalitas. Demokrasi modern tumbuh dari rasionalitas, dan programnya tidak lain daripada rasionalisasi kekuasaan. Toleransi, kebebasan, kesetaraan merupakan capaian rasionalitas demokrasi pluralistik. Sementara itu sentimentalitas mengendap dalam sisi gelap yang ingin dibatasi oleh rasionalitas, seperti: dalam prasangka-prasangka, stigmatisasi, diskriminasi, pengadilan massa, primordialisme, ujaran kebencian, dst. Problem rasionalitas dalam literatur akademis adalah membengkokkan isi komunikasi dan mempersepsi dunia secara salah sehingga membuat orang tidak mampu menghadapi dunia nyata (hal. 14). Politik memang wilayah perjuangan kekuasaan yang dapat dimasuki dengan sentimentalitas, karena politik bermain dalam keyakinan moral dan pertentangan antara kawan dan lawan. Denominasi lawan disebarkan melalui hoaks ke media-media sosial jelas bukan sentimen spontan, melainkan hasil kalkulasi politis terencana dengan melibatkan anggaran besar. Instrumentalitas sentimen di sini jelas tidak sentimental (lagi), melainkan rasional di alam modern (hal. 15). Dalam sentimentalitas itu, hukum yang mestinya menjadi sistem, dan aparat-aparat yang menduduki sistem itu akan kehilangan keseimbangan, begitu netralitas mereka tergerus oleh kepentingan-kepentingan politis sehingga tidak lagi melayani semua, melainkan sebagian (hal. 16).

Apakah agama (dalam demokrasi) selalu irasional? Jika menilik sejarah, agama merupakan sumber rasionalitas. Jauh sebelum modernitas, lewat agamalah umat manusia tahu tentang yang benar dan salah, tentang makna eksistensi individu dan kelompok, tentang baik dan jahat. Bahkan modernitas dalam agama, yakni Kekristenan pasca Reformasi Protestan, juga ikut membentuk pemahaman diri manusia modern yang rasional, otonom, dan egaliter. Atribut 'irasional' yang dikaitkan dengan agama bisa benar, bila mengacu pada kelemahan karakter para penganutnya yang mengubah agama menjadi alat pemicu sentimentalitasnya (hal. 17).

Pemakaian agama dalam politik menunjukkan bagaimana demokrasi dapat berpasangan dengan sentimentalitas. Pilkada DKI Jakarta lalu adalah praksis demokrasi lokal yang juga menarik perhatian internasional, tidak sama sekali bersih dari

problem instrumentalisasi agama (hal. 19). Semua *language-game* agama itu, termasuk tuduhan penistaan agama merupakan konstruksi politis yang ‘sukses’ melorotkan elektabilitas petahana yang semula nyaris tak terkalahkan. Apakah cara di atas merupakan semacam praktik propaganda fasis untuk menstigma musuh atau ‘inovasi’ *marketing* politis yang sukses menjual kandidat tertentu, hampir tidak dapat dipisahkan. Karena itu sentimentalisasi agama tetap merupakan ancaman terbesar dalam demokrasi pluralitas. Dramaturgi politis pengerahan massa dengan alasan-alasan religius dapat dipakai dalam kesempatan-kesempatan lain dan hal itu tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan cadangan massa yang rentan terhadap demagogi dan disinformasi lewat media. Demokrasi telah menjadi peristiwa media yang melibatkan mesin-mesin disinformasi. Komunikasi digital telah membawa masyarakat pada apa yang disebut Dieter Seghas “politisasi fundamental”, yaitu proses di mana segala masalah masyarakat menjadi masalah politis, dan segala masalah politis menjadi masalah masyarakat. Semakin sentimenal dan irasional klaim-klaim dan sikap-sikap religius, semakin klaim-klaim dan sikap-sikap itu berfungsi baik untuk memobilisasi para pemberi suara di dalam demokrasi massa (hal. 21).

Ambivalensi antara rasionalitas dan sentimentalitas, melekat pada peran agama dalam demokrasi. Sisi kelam agama terkait dengan pemakaiannya sebagai alat kekuasaan. Di sisi kelam ini, agama terlebih monoteisme – bisa menjadi sumber intoleransi dan brutalitas dengan menggerakkan naluri-naluri tribalistik manusia. Investigasi yang dilakukan di USA memperlihatkan bahwa jaringan global kaum militan Islam melibatkan ratusan pengusaha, lembaga-lembaga karitatif, dan yayasan-yayasan radikalisme, sehingga radikalisme Islam memiliki ciri sebuah konglomerasi global (hal. 23).

Bagaimana cara menghadapinya? Pesimisme mematahkan harapan untuk perubahan, sedangkan optimisme berlebihan mengabaikan kompleksitas masalah yang menghalangi perubahan. Untuk menghadapinya dibutuhkan sikap realistis. Buku ini menawarkan sikap realistis itu dengan cara melihat secara jujur situasi kekinian hingga langkah-langkah kita

mewujudkan perubahan supaya agama dan demokrasi berjalan beriringan dengan tujuan mewujudkan *bonnum commune* (kebaikan bersama).

Agama dan Penalaran Publik

Agar komunikasi politis dapat diarahkan pada kepentingan semua pihak sehingga demokrasi dihindarkan dari sentimen-sentimen yang dikaitkan dengan identitas kelompok dan menghindarkan diri dari konflik sektarian diperlukan hikmat politis dalam bentuk ‘prosedur’ untuk membawa alasan-alasan religius ke dalam ruang publik politis. Dengan ungkapan lain, prosedur rasional ditujukan untuk mengatasi sentimentalitas dalam berdemokrasi.

Imanuel Kant (1724-1804), seorang filsuf pencerahan Jerman menulis dalam buku *Kritik der reinen Vernunft* (Kritik atas Rasio Murni) merumuskan filsafatnya tentang hubungan antara politik, alam dan moral. Dalam salah satu pasal tambahan buku itu Kant menyebut: Masalah pendirian Negara – betapa kerasnyapun pernyataan ini – dapat dipecahkan bahkan oleh suatu bangsa setan-setan (asal mereka memiliki akal). Sebutan bangsa setan-setan ini bukanlah sebuah sinisme kepada siapapun, juga kepada masyarakat kita, melainkan ilustrasi tentang sosok manusia pragmatis dalam politik modern. Kant menyebut ada dua makhluk yaitu setan dan manusia. Setan merupakan makhluk licik, pendusta, pembohong. Namun menurut Kant benturan kepentingan egoistis mereka satu sama lain akan memaksa mereka menjadi rasional-strategis untuk menyepakati suatu konstitusi yang menjamin kepentingan mereka masing-masing. Karena mereka tidak punya agama, moral, ideologis, maka solusi mereka selalu pragmatis. Mereka tidak bertengkar jika struktur sosialnya berjalan secara adil.

Kant menyebut terdapat asas-asas untuk mewujudkan prosedur demokratis yang dapat melindungi masyarakat majemuk dari gerakan-gerakan radikal anti keragaman. Asas pertama: *susunlah konstitusi negara yang netral dari agama dan moral, sehingga tidak menjerumuskan rakyat pada konflik moral ataupun agama, melainkan memperhitungkan bagaimana “mekaniske alam” mengatur hubungan antar*

individu (hal. 34). Manusia membutuhkan konstitusi (hal 36). Lebih baik menerapkan sistem hukum dan managerial pemerintahan yang memaksa manusia agar dapat menghormati kebebasan orang lain, bukan karena alasan moral atau agama, melainkan karena alasan pragmatis, yakni demi kebebasannya sendiri. Kant yakin bahwa benturan kebebasan akan membuat manusia tunduk pada hukum universal. Itulah konstitusi yang merupakan kepentingan *civil society*. Asas kedua, *Pimpinlah negara tanpa memaksakan kebenaran salah satu agama atau moralitas rakyatmu sebagai alasan kekuasaanmu, melainkan setialah kepada konstitusi kebebasan itu*. Negara harus netral (hal. 37-39). Asas ketiga: *periksalah terus kesesuaian konstitusi kebebasan itu dengan aspirasi publik di bawah tatapan mata publik*. Semua hal harus dapat diakses oleh publik (kepublikan). Hukum dan konstitusi mencerminkan nalar publik, sedemikian rupa sehingga setiap pasal konstitusi atau hukum mencerminkan aspirasi universal publik. Konstitusi yang netral dari kultur dan disusun atas dasar realisme kepentingan alamiah adalah sebuah “universalisme keras”. Universalisme keras bermanfaat untuk mengatur hubungan sosial – politik masyarakat majemuk dan universalisme keras mesti dilengkapi dengan “universalisme lunak”. Universalisme lunak tak lain daripada interaksi nilai-nilai agama yang berbeda-beda dalam horizon kemanusiaan dalam keberagamannya (hal. 43). Asas ke-empat: *konstitusi negara harus memungkinkan saling pemahaman antar agama dan memberi ruang untuk titik nilai-nilai agama dan moral yang berbeda-beda, karena saling pemahaman akan nilai universal bersama itu juga merupakan ‘aspirasi publik’ dalam masyarakat majemuk/kompleks* (hal. 44).

Masyarakat kompleks bukan hanya karena berbagai orientasi nilai di dalamnya, melainkan juga karena menghasilkan risiko-risiko baru sehingga menjadi makin kompleks. Pangkalnya adalah kepentingan diri (hal. 79). Bagaimana tuntutan normatif keadilan dapat dipenuhi oleh fakta pementingan diri? Keadilan adalah presedur yang *fair* untuk mengatur (managemen) kepentingan-kepentingan diri. Managemen kepentingan diri dalam sebuah negara diatur dengan sistem hukum positif, di mana terdapat distingsi antara wilayah publik

dan privat, antara konsepsi adil dan konsepsi baik (hal. 85) yang melahirkan komunitas etis. Komunitas etis bersifat politis sekaligus etis. Secara praktis, komunitas etis terwujud melalui komunikasi warga di dalam ruang-ruang publik kepentingan-kepentingan diri dan sikap privat akan dilampaui, dan proses belajar itu akan melatih warga untuk lebih mengupayakan kepentingan publik. Keadilan dalam komunitas etis dimaknai pula sebagai suatu keadaan menjelang dan hal itu merupakan keadilan substansial di mana antar sesama manusia mampu berempati, peduli terhadap kepentingan bersama (hal. 87).

Senada dengan Kant, Profesor Meyer menulis bahwa demokrasi itu netral terhadap agama atau budaya tertentu. Mungkinkah itu terjadi? Pertama-tama kita perlu memerhatikan perbedaan antara demokrasi sebagai sistem nilai – sebuah mekanisme politik untuk pengambilan keputusan publik yang mewujudkan kepentingan umum dan demokrasi sebagai *etos politis* – energi menggerakkan individu-individu menjalankan demokrasi. Dengan melihat dua hal itu, sulitlah melepas demokrasi dari konteks agama tertentu. Bahkan agama dan kebudayaan itulah yang ikut membantu penciptaan etos demokrasi (hal. 47). Dalam praktik, terdapat kendala-kendala partisipasi demokrasi seperti sistem privilese KKN, dan etnosentrisme. Selain itu neoliberalisme yang membiarkan modal lebih berkuasa daripada politik. Musuh lain adalah teknokratisme di mana pengambilan keputusan dilakukan oleh para teknokrat serta fundamentalisme agama. Profesor Meyer menyebut bahwa keempat hal itu memiliki kesamaan yaitu pengabaian terhadap partisipasi publik yang semakin luas dalam pembentukan opini dan kehendak demokratis (hal. 49). Untuk menghindari bahaya itu demokrasi membutuhkan sabuk pengaman, yaitu hukum yang adil. Hukum menjadi sabuk pengaman demokrasi dalam dua sisi: pada sisi satu hukum dan prosedur demokratis melindungi sistem politik dari kekuasaan sosial, yakni desakan massa ekstraparlementer (demo massa) yang ingin mempraktikkan demokrasi langsung melalui anarkisme dan egoisme kelompok. Pada sisi lain hukum dan prosedur demokratis akan memudahkan tercapainya lapisan intermedier yang menjadi mediasi antara sistem politik dan masyarakat sipil. Di sini hukum harus ditegakkan dan

DPR/MPR harus terus bersambung dengan aspirasi-aspirasi dalam ruang publik (hal. 54).

Dengan adanya sabuk pengaman demokrasi, demokrasi memungkinkan solidaritas kemajemukan. Munculnya kasus intoleransi dan problem identitas yang mendera masyarakat bukankah hasil demokrasi, melainkan problem transisi demokrasi (hal. 59). Di sinilah demokrasi menumbuhkan semangat kebangsaan dan nilai-nilai universal. Dari sudut pandang demokrasi, “bangsa” bukanlah suatu identitas yang telah selesai, ia adalah suatu *identity in the making*. Sejauh kita cermati, apa yang disebut “keindonesiaan” terancam oleh sekurang-kurangnya dua sisi: dari sisi demokrasi: terjadi reduksi nilai-nilai *dari bawah*, termasuk dibukanya peluang formasi identitas lewat agama-agama. Radikalisme menjadi ancaman kebangsaan kita. Ancaman lain adalah dari sisi globalisasi, universalisme pasar dan nilai-nilai komersialnya mengikis *dari luar* kekhasan identitas komunitas lokal yang merupakan pengokoh identitas nasional. Respon yang tepat terhadap globalisasi dan demokratisasi bukanlah kembali ke akar primordial, melainkan merekonstruksi identitas bersama di ruang publik sebagaimana disinggung di atas bahwa “bangsa” merupakan *identity in the making* (hal. 62). Habermas merumuskan konsep konstruksi identitas bersama di ruang publik dengan sebutan “identitas post – konvensional” dan akhirnya bermuara pada sebutan patriotisme konstitusi. Patriotisme konstitusi bukan berarti bahwa nilai-nilai yang berasal dari agama, tradisi kultural ataupun dari keluarga ditinggalkan atau diabaikan. Nilai-nilai itu “diinterpretasi dalam terang klaim-klaim dan prespektif-perspektif universal yang juga menemukan ungkapannya – betapapun tidak sempurnanya – sebagai hak-hak sipil dasar dan sebagai norma-norma konstitusional secara lebih umum (hal. 63). Tokoh-tokoh Indonesia yang mewujudkan patriotisme konstitusi nampak dalam diri Abdurrahman Wahid, Romo Mangun dan Yap Thian Hien. Didorong oleh iman religius dan kesadaran moral universal, mereka membela nilai-nilai bersama yang terkandung di dalam konstitusi negara hukum kita. Dalam hal ini, kekristenan terlibat mulai dari pembentukan nilai-nilai dasar hingga gerakan dari orang-orang Kristen dalam partisipasinya di ruang publik (dalam hal ini Budi Hardiman

menyebut Yap Thiam Hien yang seorang Tionghoa – Kristen). Iman transformasional Kristen memungkinkan seorang Kristen membela hak-hak warga di ruang publik (hal. 67). Iman pada Allah menjadikan Yap Thiam Hien memiliki motivasi dan visi yang membuatnya berani melawan ketidakadilan, menegakkan demokrasi. Visi kemanusiaannya menumbuhkan identitas-identitas post-konvensional dan toleransi terhadap kelompok-kelompok berlainan dalam masyarakat. Di sinilah demokrasi menjadi toleran terhadap segala kemungkinan, tetapi harus jadi intoleran terhadap intoleransi itu sendiri (hal. 71).

Peristiwa Ahok dan Pilkada Jakarta menyadarkan kita bahwa etis kewarganegaraan yang inklusif ternyata mengalami ujian berat. Isu Al-Maidah 51 yang dihadapi Ahok membantu kita mengukur rasionalitas publik. Distorsi yang terjadi setelah tuduhan penistaan agama akibat unggahan sentimen video pidato tidak berasal dari rasionalisme publik melainkan dari sentimentalitas suatu kerumunan yang membiarkan emosi massa diaduk-aduk oleh mereka yang tidak memiliki argumen rasional baik. Brutalitas di dunia maya berubah ke dunia nyata. Kekerasan, kepicikan berkembang di tengah masyarakat akibat penggunaan strategi psikologi politis yang digunakan oleh sekelompok orang untuk mencari untung dalam politik (hal. 75).

Fenomena Pilkada Jakarta merupakan fenomena yang dapat terjadi di semau belahan dunia. Kebangkitan sentimen etnis dan religiusitas merupakan pemicunya. Dalam konteks Indonesia, demokratisasi dan otonomi daerah menjadi pemicu relativisme nilai-nilai pada tribalisme, sektarianisme dan radikalisme agama. Dalam konstelasi ini keadilan dapat kehilangan daya normatifnya. Keadilan menjadi lemah karena politisasi. Dalam praktik, lembaga peradilan justru menjadi alat bagi koruptor untuk membebaskan diri dari tuduhan. Bagaimana keadilan dapat diwujudkan dalam masyarakat majemuk?

Budi Hardiman mengajak kita melihat lebih jauh. Untuk menemukan keadilan dalam masyarakat majemuk, Budi Hardiman menyarankan agar pertama-tama membuat distingsi antara keadilan prapolitis dan politis menuju keadilan

transformasional. Konsep keadilan prapolitis dalam filsafat politik dewasa ini disebut sebagai *the idea of good*. Sedangkan konsep keadilan politis adalah keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak atau *the idea of the right* – keadilan yang menuntut persetujuan semua pihak dalam bentuk undang-undang (hal. 91).

Dalam ranah filsafat politik, hubungan antara keadilan prapolitis dan keadilan politis dilaksanakan dalam 3 (tiga) kemungkinan. *Pertama*, konsep keadilan prapolitis tentang keadilan yang berasal dari kelompok mayoritas atau etnis harus diterima (seperti dalam negara Islam dan negara otoriter) – (keadilan komunitarian). *Kedua*, berbagai konsep prapolitis tentang keadilan ditoleransi sedemikian rupa sehingga di masing-masing wilayah makna keadilan dapat dijabarkan menurut kepentingan setempat (keadilan liberal). *Ketiga*, berbagai keadilan prapolitis memiliki peluang yang sama menjadi politis (keadilan multikultural). Dari ke-tiga kemungkinan itu, Budi Hardiman mengusulkan keadilan transformasional. Jalan ini memungkinkan keadilan publik mencerminkan keadilan bagi semua pihak. Keadilan sebagai simetri sosial terlaksana dalam distribusi hak-hak komunikasi semua pihak secara sama, sementara keadilan sebagai asimetri absolut terlaksana dalam upaya untuk memahami dan mendengarkan ‘yang lain dalam keberlainannya’, yaitu dalam hal ini untuk kelompok-kelompok prapolitis khas yang eksklusif dari sistem hukum modern. Lewat diskursus publik rasional itu, berbagai kelompok melihat norma-norma prapolitis dalam horizon hak-hak azasi manusia (hal. 105). Dalam gambar di halaman 106 kita menemukan ada keseimbangan dalam kelompok-kelompok kultural dalam berkomunikasi secara simetris, saling mendengarkan yang lain serta diatur dalam sistem hukum modern (hal. 106). Keadilan transformasional diletakkan di dalam sebuah ‘ruang hermeneutis’ di antara tradisi religius - kultural dan sistem hukum positif. Di sini memang dibutuhkan waktu dan tenggang rasa terhadap perbedaan, sebagaimana dikatakan Marcus Aurelius, “tenggang rasa adalah bagian dari keadilan” (hal. 109).

Agama dan Radikalisme

Sisi kelam instrumentalisasi agama kita bahas setelah melihat seperti apa agama dalam penalaran publik. Di sini kita akan melihat analisis-analisis tentang hubungan antara agama dan pemakaian sentimen untuk memicu kekerasan.

Fakta globalisasi saat ini adalah “kemunduran dalam mendengarkan” akibat membanjirnya informasi. Harga yang harus dibayar dari hal itu adalah banalitas, kedangkalan pengalaman, hilangnya ketajaman, ketumpulan persepsi dan hilangnya daya imun terhadap kecemasan. Dalam situasi ini pilihan yang dilakukan adalah bungkam (*Arcanum*). Banyak orang memilih bungkam karena ketidaknyamanan terhadap keadaan (termasuk Imam Samudra – pelaku kekerasan dengan bom bunuh diri). Kekerasan itu bungkam, karena verbalisme berakhir di sini (hal. 115). Semua pihak melangkah dalam kecemasan (hal. 116).

Akal sehat membantah bahwa kekerasan dapat muncul dari kesalehan. Tidak mungkin Tuhan memerintahkan yang jahat. Lalu bagaimana menjelaskan kekerasan atas nama Tuhan? Jangan dikira bahwa pelaku teror tidak berpikir dengan logika yang sehat. Kebencian telah mendistorsi pikiran yang mencari-cari pembenaran pada ayat-ayat agama. Pelaku teror biasanya berperilaku santun. Mengapa yang santun itu berperilaku banal? Radikalisme lahir dari suatu cara berpikir/logika (hal. 117). Hal itu terjadi karena perversi keyakinan yang dimulai dari hubungan dilematis antara kesalehan dan kepatuhan pada perintah Tuhan. Plato, seorang filsuf Yunani kuno telah menyampaikan problem ini. Muridnya Socrates menulis dalam *Eutyphro*. Dalam buku itu Plato mengajukan pertanyaan termasyur, “Apakah orang saleh dikasihi dewa-dewa karena ia saleh, atau ia saleh karena ia dikasihi dewa-dewa?” *Eutyphro* sendiri adalah seorang ulama yang menyarankan kepada Socrates bahwa kesalehan adalah persekusi atas penista agama (hal. 118). Dengan dipenuhi kebencian berbalut kesalehan, mereka siap menyongsong kematian mereka sendiri. Kematian kembali memesonakan, karena dipersepsi kembali sebagai akses ke keabadian dan bukan sekadar berhentinya ego sebagaimana dipahami dalam sekularitas. Kematian si saleh ini, tanpa kasih dan pengampunan, menyisakan ketakutan dan kehancuran.

Plato menyebut perilaku macam itu sebagai perdagangan dengan Tuhan: mereka memberi kurban untuk mendapat pahala surgawi (hal. 119). Sebenarnya apa makna kesalehan itu? Masalah kesalehan adalah bagaimana yang religius, yaitu yang baik menurut Tuhan, dan yang moral, yaitu yang baik menurut manusia dapat disatukan sekaligus sebagai idea. Kesalehan macam itu tidak akan merusak toleransi religius, bila orang bersikap moderat dan inklusif terhadap yang lain dalam keberlainannya. Kesalehan bersumber dari iman yang mengakui kemajemukan manusia sebagai berkat Tuhan (hal. 120).

Kembali pada fanatisme agama, kekerasan yang berkaitan dengan agama bukan tipe baru sama sekali dalam peradaban manusia. Bersama Trutz von Trotha kita dapat berbicara tentang “eksistensialisme religius dan kekerasan”, yaitu: proses pemaknaan kekerasan sebagai ungkapan autentisitas religius. Wolfgang Huber menyebut hal itu dengan nama “kekerasan sebagai ibadah”. Para pelaku teror meyakini bahwa apa yang mereka lakukan sebagai tindakan kemartiran untuk memurnikan dunia dari kekafiran, suatu ibadah pada Allah. Di sini ada aspek tidak hanya justifikasi, melainkan juga aspek motivasi, atau keduanya berkelindan: justifikasi menimbulkan motivasi dan motivasi mencari justifikasi (hal. 122).

Seperti apa konteks fenomena kekerasan sebagai ibadah? Dari segi normatif, demokrasi merupakan suatu demokratisasi sebagai suatu proses membuka peluang-peluang untuk kebebasan dan kesetaraan di antara warganegara sehingga mereka dapat menentukan diri sebagai suatu komunitas politik. Akan tetapi, dari segi faktual, demokratisasi justru menghasilkan risiko-risiko (hal. 124). Dalam arti ini masyarakat risiko juga merupakan masyarakat dengan potensi kekerasan. Sebagaimana risiko didistribusikan seolah-olah tanpa pusat yang jelas, kekerasan yang terglobalisasi juga menjadi sporadis (hal. 125). Kekerasan yang dilakukan oleh manusia selalu melibatkan motif dan kesadarannya, maka juga diliputi membenaran-pembenaran. Ada dimensi moral dalam penggunaan kekerasan, maka kekerasan tidaklah *virtue – free*, melainkan *value – laden*. Robert Paul Wolff membedakan kekerasan dengan konsep-konsep lain yang bertetangga

dengannya yaitu: kekuasaan (*power*), kekuatan (*force*), dan wewenang (*authority*). Perbedaan antara kekuatan dan kekerasan terletak pada dimensi moral, karena kekuasaan tidak lain daripada “pemakaian kekuatan secara tidak legitim atau tidak sah untuk mempengaruhi keputusan-keputusan melawan kehendak atau hasrat orang-orang lain. Dengan batasan ini, teror 11 September adalah kekerasan, sedangkan penembakan atas Osama Bin Laden di Pakistan bukan kekerasan (hal. 127).

Fenomena kekerasan sangat kompleks. Johan Galtung mengelompokkan kekerasan dalam dua jenis yaitu kekerasan langsung (*direct violence*) – kekerasan menimpa langsung pada korbannya dan kekerasan struktural (*structural violence*) – kekerasan yang melekat pada struktur-struktur interaksi sosial, pada bahasa, pada diskursus (Habermas menyebut komunikasi yang terdistorsi secara sistematis). Galtung menemukan empat motif dasar pendorong kekerasan yaitu kebutuhan akan keberlangsungan hidup, kebutuhan akan kesejahteraan, kebutuhan akan identitas dan kebutuhan akan kebebasan (hal. 129). Jika kebutuhan-kebutuhan itu tidak terpenuhi, akan dihasilkan berturut-turut kematian, kesengsaraan, keterasingan, penindasan (tabel dapat dilihat pada halaman 130). Bagaimana kekerasan dengan motif religius? Kekerasan ini dapat ditempatkan dalam konteks krisis-krisis solidaritas dalam masyarakat dewasa ini (ingat masyarakat berisiko) di tengah liberalisme yang dominan dalam moderinitas. Budi Hardiman menyebut tokoh Sayid Qutb sebagai contoh pejuang gerakan radikalisme Islam dalam konteks liberalisme dan modernitas. Menurut Qutb, liberalisme dan komunisme telah gagal menyelamatkan dunia dari krisis. Sekarang saatnya giliran Islam menjadi solusi bagi krisis. Model ini menarik untuk menghubungkan kekerasan atas nama Tuhan. Pada akhirnya kekerasan atas nama Tuhan sebagai ibadah tidak lain sebagai kekerasan kultural (Galtung). Analisis Galtung juga menunjukkan bahwa dalam berbagai ideologi modern yang lalu menjustifikasi kekerasan terkandung semacam teologi implisit yang berciri eksklusivistis (hal. 142). Dengan menggunakan analisis politik Marx tentang dikotomi kelas proletariat dan kelas kapitalis yang mempertentangkan antara orang percaya dan tidak percaya, Schmitt menyebut teologi ini sebagai pionir bagi politik, yaitu

dikotomi kawan dan lawan. Hal itu merupakan bentuk sekularisasi teologi. Bila teologi merupakan asal-usul pemikiran tentang anatomi kawan dan lawan, tentu boleh dikatakan bahwa teologi adalah ibu dari politik (hal. 143). Dalam praktik, justifikasi teologi menimbulkan motivasi pelaku, dan motivasi pelaku mencari justifikasi teologis. Karena itu perlu upaya hermeneutik yang tepat atas doktrin-doktrin agama yang selama ini menjadi sumber pembenaran aksi-aksi kekerasan, sedemikian sehingga interpretasi-interpretasi doktrin agama semakin dijauhkan dari kekerasan (hal. 145). Kemurkaan yang oleh agama-agama monoteis dilambungkan sampai ke langit-langit teologis hanya dapat dipadamkan lewat cinta kasih dan pengampunan yang melampaui akar-akar spiritualitas manusia (hal. 150). Hal yang patut disayangkan adalah politik tidak beroperasi dengan cinta, melainkan dengan kuasa (hal. 151). Rasionalisasi kekuasaan dalam sistem hukum dengan gerakan populis melahirkan gerakan murka dalam demokrasi. Kerumunan bersuara atas nama demokrasi dengan nada sentimentalitas digerakkan demi tujuan politik kekuasaan. Populisme bukan hal baru dalam dunia politik dan sejak dulu dimaknai negatif karena melakukan “emosionalisasi dan personalisasi politik”. Akhir-akhir ini merebak gerakan-gerakan populis Kanan yang memakai fasilitas demokrasi, seperti hak untuk berdemonstrasi, untuk meraih tujuan-tujuan konservatif yang sebenarnya bertentangan dengan sistem demokrasi (hal. 153). Media-media sosial menjadi alat seduksi yang populer bagi para populis Kanan untuk mengganggu *establishment* (hal. 154). Populisme bukanlah solusi sosial, melainkan simptom penyakit sosial. Dalam demokrasi, gerakan murka kekuatan konservatif ini boleh dikata sedang mempertontonkan problema sosial yang selama ini ditutup-tutupi: demokrasi telah dibajak oleh oligark. Menurut Pasquino, mangsa paling empuk bagi populisme Kanan adalah demokrasi elektoral, karena pada saat suksesi sedang berlangsung, dana sangat besar digelontorkan dan mekanisme hukum melemah. Populisme bukanlah pasangan ideal bagi demokrasi (hal. 159). Pada saat yang sama, populisme mengancam negara hukum sebab dapat menekan parlemen, mendikte pemerintah, mengancam pengadilan dan polisi sehingga meracuni ruang publik. Dewasa ini populisme dapat dipermudah lewat media sosial seperti: *Twitter*,

WhatsApp, Line, Facebook, dst. Bila gerakan populis Kanan berhasil dalam suksesi, apakah mereka konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi? Dalam penelitian Pallaver dan Gartner ditemukan bahwa populisme tidak sanggup menghapus ambiguitasnya. Intimitas dan pengkhianatan atas demokrasi yang melekat pada populisme menyebabkan kesulitan bagi gerakan ini sendiri ketika duduk di pemerintahan (hal. 160). Akhirnya kekuasaan dibayar dengan memangsangkan demokrasi kepada kepentingan-kepentingan predatoris para oligark bisnis – politis (hal. 161).

Di tengah situasi macam itu apakah kita akan diam? Budi Hardiman mengutip tulisan Elie Wiesel. Ia menyebut lawan cinta bukanlah kebencian, melainkan pengabaian; pengabaian menciptakan kejahatan. Kebencian adalah kejahatan itu sendiri (hal. 163). Di sini Budi Hardiman mengajak kita meninggalkan posisi sebagai penonton dengan menjadi *civil courage*. Kurt Singer menyebut *civil courage* tidak “mengajari” orang lain, melainkan “menunjukkan pendirian” pada orang lain. Isinya tidak privat, melainkan *publik*, yakni mengacu pada kebaikan bersama atau keadilan (hal. 166). Menumbuhkan *civil courage* juga berarti menumbuhkan keinginan mereka yang berada di sisi kiri untuk beralih ke sisi kanan dengan mengasah empati, keberpihakan kepada yang lemah, meningkatkan tanggungjawab moral dan rasa keadilan (hal. 167). Pada halaman 168, dapat dilihat tabel situasi kekerasan, *civil courage* dan risiko pembela *civil courage*. Untuk mewujudkan *civil courage* kita tidak bisa sendiri. Perlu jejaring warga dengan *civil courage* dengan *civil disobedience* (ketidakpatuhan warga). Masyarakat yang melakukan *civil disobedience* memiliki berbagai latar belakang nilai-nilai dan pandangan hidup didorong untuk mengutamakan pengampunan daripada pemaksaan, suara hati daripada perintah atasan atau desakan kelompok. Pada lini terdalam agama-agama dunia kekuatan yang mendorong *civil disobedience* itu melimpah, namun orang modern harus piawai menjauhkan agama dari ideologi dan manipulasi, dari kuasa dan pasar. Tanpa kepiawaian itu, agama justru melenyapkan kemanusiaan dalam kepatuhan dan penindasan (hal. 173).

Post – Sekularisme dan Peran Publik Agama

Dua setengah abad silam, masyarakat Eropa menghasilkan suatu cara mengakhiri absolutisme agama dan konflik-konflik agama. Mereka mengurung agama ke ranah privat. Dewasa ini pemisahan antara agama dan politik itu mulai diguncang dan dipersoalkan kembali. Penghancuran menara kembar di New York pada 11 September 2001 menjadi era baru. Filsuf Jurgen Habermas menyebut bahwa kita sedang memasuki era “masyarakat post – sekular” yang di dalamnya sekularisasi harus diinterpretasi secara baru sebagai proses saling belajar antara pemikiran sekular dan pemikiran religius (hal. 176). Kata sekuler seringkali menjadi kata yang sensitif dan dibenci oleh umat beragama. ‘Sekular’, ‘sekularisasi’, dan ‘sekularisme’ berasal dari kata dalam bahasa latin *saeculum* yang artinya “zaman”, atau *saecularis* yang berarti “duniawi”. Di Barat, istilah sekularisasi secara luas diartikan sebagai proses pemisahan antara gereja dan negara. Secara umum kata itu dimaknai sebagai proses *emansipasi* tatanan politis dari dominasi dan determinasi agama. Proses ini harus dimaknai sebagai suatu pencapaian peradaban Barat yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti: aspek politik, kultural, ekonomis, sosial, dan bahkan aspek metafisik dan epistemis. Mengapa Barat (pada masanya) mengambil jalan sekularisasi untuk peradabannya? Sekularisasi adalah respon terhadap problem yang berabad-abad mencengkeram manusia: *absolutisme agama*. Sebagai sistem dunia total agama dan simbol-simbolnya melekat pada kekuasaan politis dan memegang monopoli interpretasi atas apa yang wajib dilakukan dan dipikirkan oleh individu untuk keselamatannya di dunia dan di akhirat. Atas nama Allah, otoritas politis dianggap sah untuk mengawasi pikiran, keinginan, perasaan dan iman individu. Dampaknya iman dipakai sebagai norma publik, iman diselewengkan secara ideologis dan memberangus pikiran. Penuainya tentu bukan agama, melainkan para pembiak kekuasaan yang secara licik menggunakan agama sebagai bahan bakar untuk memobilisasi massa. Agama, keyakinan tulus akan keselamatan, berbuah menjadi alat kuasa untuk mengalihkan motivasi berkorban kepada Allah ke dalam kesediaan untuk menumpahkan darah demi kepentingan ideologi-politis picik (hal. 177-178). Sekularisasi membantu masyarakat barat menempatkan agama pada posisinya yang

luhur, yaitu hubungan antara manusia dengan Yang Ilahi, sehingga orang beragama bukan karena agama itu mengokohkan identitas sosial atau eksistensi politis seseorang, melainkan beriman dalam agama itu merupakan hubungan dengan Yang Ilahi. Dengan jalan itu pula agama-agama, denominasi-denominasi berbeda tidak terjebak sebagai objek sentimentalisi publik di dalam masyarakat majemuk (hal. 179).

Negara hukum modern, juga Indonesia, menghadapi dua macam jebakan yang dihasilkan lewat sekularisasi. Negara masuk ke dalam jebakan sekularisme jika menyingkirkan setiap alasan religius dan diyakini oleh para warganya yang beriman. Namun, diujung lain menjaga jebakan radikalisme agama, jika negara menerima begitu saja alasan religius dan menjadikannya regulasi publik (hal. 180). Kondisi ‘post-sekular’ bisa dimaknai sebagai kewaspadaan terhadap kedua jebakan tersebut dalam proses legislasi hukum. Habermas menjelaskan post sekular suatu masyarakat sebagai keterbukaan komunikasi dan dialog. Dalam kondisi ini masyarakat yang mengaku beragama (fideis) dan tidak beragama (sekularis) bersedia saling mendengarkan. Habermas menjelaskan lagi bahwa aspirasi religius dalam ruang publik tak boleh dibentengi dari kritik rasional, seolah keyakinan itu dimargaswatwakan sebagai spesies langka yang harus dilindungi.

Sekularisme keras dan radikalisme agama menghasilkan ‘pengapuran’ dalam pikiran dan membutuhkan ‘obat’ untuk melancarkan lalulintas ide kepala. Obat untuk membuat orang relaks terhadap dogmatisme agama adalah belajar dari para penulis skeptik. Obat untuk relaks dari saintisme dan sekularisme adalah belajar dari penulis-penulis kreatif yang membuat kita berpikir ulang tentang seberapa jauh kita memicikkan diri dengan memuja objektivitas ilmiah. Setelah menemukan obat relaks itu, kita mungkin dapat melanjutkan pencarian kebenaran (hal. 183).

Sejak abad ke-21, istilah post – sekularisme mulai masuk ke dalam literatur filsafat dan forum-forum akademis di Eropa. William A. Barbieri mengulas tentang menguatnya kembali

peran publik agama hanyalah salah satu gejala post – sekularitas. Pada halaman 190 terdapat tabel tentang enam aspek post-sekularitas, proses berlangsungnya dan keterangan menyangkut post – sekularitas sebagaimana digagas oleh Taylor.

Bagaimana gagasan post – sekularisme di Indonesia? Indonesia berbeda dengan Barat. Di Indonesia, agama tidak harus kembali karena tidak pernah pergi. Kata sekularisme merupakan kata porno untuk diucapkan. Jika di Barat sekularitas ditantang untuk belajar mendengarkan agama kembali, di Indonesia justru sebaliknya: Agama ditantang untuk belajar dari sekularitas agar tidak menyepikan kemanusiaan dan dimensi-dimensi kehidupan. Proses belajar antara agama dan sekularitas itu sebenarnya tidak asing bagi kita sebab telah tercantum dalam Pancasila. Pancasila merupakan wawasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang mendialogkan ketuhanan dengan berbagai dimensi peradaban, yaitu: kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan. Ketuhanan tidak hanya sebagai prinsip ‘politis’ namun juga metafisis. Indonesia dikonsepsikan sebagai negara modern yang tidak serong ke negara agama, tetapi juga bukan negara sekular. Hebat.....! Tanpa gaduh dengan post-sekularisme, Indonesia sebenarnya post-sekuler, sekurangnya dalam cetak birunya (hal. 192-193).

Dewasa ini agama tidak bisa begitu saja dibatasi dalam ruang privat terbukti dari berbagai gejala empiris. Di mana-mana gerakan-gerakan religius menjadi lanskap politik (hal. 202). Bagaimana menilai fenomena tersebut? Kita tidak dapat menilai gejala-gejala itu sekadar sebagai risiko atau gangguan demokrasi. Ada yang lebih dalam daripada itu: harapan-harapan kelompok-kelompok agama untuk berpartisipasi dalam demokrasi perlu diperhatikan. Apa artinya? Sebagai warganegara akan bertindak dari *conceptions of the good* yang termuat dalam nilai-nilai religius dan kultural kita, sebelum kita melampaui itu dengan masuk ke dalam tilikan moral dari *conception of justice*. Habermas mengingatkan agar semua warganegara saling belajar. Ada tiga pola hubungan saling belajar yang menandai post-sekularitas masyarakat dewasa ini. *Pertama*, hubungan antara para warga negara dengan

kelompok-kelompok agama, *kedua*, hubungan antara warganegara beriman dan para warganegara sekuler. *Ketiga*, hubungan antara para warga dari satu agama dengan para warga dari agama lain (hal. 203). Di mana peran negara? Di antara ke-tiga pola itu, negara harus menjaga netralitasnya. Netralitas harus diartikan sebagai sikap proaktif menjamin kebebasan agama untuk semua golongan. Tercakup dalam sikap proaktif, menindak tegas para pelanggar hak kebebasan beragama, suatu toleransi terhadap intoleransi adalah sebuah kejahatan karena dengan sikap itu negara memihak pada penindasan terhadap warganya sendiri. Di sisi lain, kelompok-kelompok agama dalam masyarakat tidak bisa memaksakan aspirasi-aspirasi partikular pada pemerintah. Semua kelompok didorong untuk saling mengerti.

Dalam konteks Indonesia, duduk persoalan tidak terletak pada boleh tidaknya agama bersuara dalam ruang publik, karena sejak awal agama sudah (bahkan terlalu keras) bersuara di sana. Kelompok-kelompok Islam garis keras berjuang untuk mengganti konstitusi dan mendirikan negara agama di Indonesia (hal. 215). Kita bersyukur bahwa masyarakat mayoritas muslim di Indonesia moderat, para politikus menjalankan sistem politis mengartikulasikan sikap-sikap moderat, meski mereka kerap dibungkam oleh teriakan-teriakan kelompok-kelompok radikal yang intoleran (bandingkan saat TGB mendukung Jokowi, Kapita Ampera menjadi caleg PDIP).

Untuk dapat memahami peran tokoh berpengaruh di Indonesia yang mengajak publik menalar agama dan politik dengan baik, kita dapat membaca bab 16. Bab ini mengulas ketokohan Nurcholis Madjid yang mengambil posisi komunitarian dalam memahami hubungan antara agama, masyarakat dan negara dengan pandangan *civil society* atau dalam Islam disebut dengan masyarakat madani. Nurcholis Madjid juga mendorong agar umat Islam melakukan dialog-dialog nilai-nilai inklusif dalam Islam dan mengajak umat memikirkan post-sekular tanpa berpikir metafisis, karena pikirannya tetap berpijak pada wawasan religiusnya yaitu Islam (hal. 231). Untuk mencapai hal itu, kita perlu melihat pemikiran Nurcholis tentang Islam dan pluralistis dan hal itu menyangkut proses hermeneutisnya

terhadap teks-teks Al-Quran. Hasil dari proses hermeneutis Nurcholis adalah: *civili society* dalam pengertian Islam merupakan komunitas religius (umat Islam) yang inklusif (hal. 223). Dari praksis komunitas religius inilah toleransi diturunkan untuk menerangi hubungan-hubungan politis dalam masyarakat Indonesia yang majemuk nilai-nilai *civil society* diturunkan dari agama, bukan dari metafisis (iman sekular, nilai-nilai liberal ala pasar bebas). Untuk menjadi toleran dalam demokrasi pluralistis, orang tidak perlu menjadi *schizophrenic* dengan menguburkan identitas religiusnya, sehingga konsep dan tindakan mewujudkan *civil society* berpijak dari konsep-konsep sebagaimana dijamin dalam agama Islam (hal. 229).

Hal lain yang perlu disadari di Indonesia adalah kondisi masyarakat kita terglobalisasi secara ekonomi. Kekuatan-kekuatan pasar kapitalis bersifat destruktif bagi solidaritas sosial. Radikalisme agama kerap merupakan respon atas krisis solidaritas dan marginalisasi yang ditimbulkan oleh ekspansi pasar kapitalis itu (hal. 213). Saya memberikan catatan terkait hal ini. Sejak Jokowi menjabat sebagai presiden, isu neoliberal, antek Amerika kerap dikatakan kepada beliau. Kelompok-kelompok radikal kerap memakai isu itu dalam aksi-aksinya. Di sisi lain, kelompok-kelompok radikal itu juga menyebut Jokowi PKI. Anehnya, banyak pengikut radikal percaya dengan isu itu. Padahal antara kelompok ekonomi liberal dan komunis jelas berbeda. Mana mungkin Jokowi liberal sekaligus komunis? Di Indonesia juga terjadi perselingkuhan pemodal dengan kalangan radikal. Demo Ahok berjilid-jilid disinyalir bukan hanya masalah sentimenalistas agama, melainkan juga terdapat andil para pemodal, koruptor yang kehilangan kesempatan mengeruk uang negara.

Bagaimana mewujudkan kebebasan beragama dalam negara hukum demokratis seperti Indonesia? Saat ini kita berada di zaman hiperkompleks. Di zaman hiperkompleks ini para petarung doktrin memperebutkan pengaruh jejaring. Mereka tampil di arena politik. Di zaman ini pula, problem kita (di Indonesia) bukanlah sekularisme, melainkan radikalisme agama. Bagaimana menjamin kebebasan agama di era hiperkompleks ini? Budi Hardiman menyebut bahwa proses

belajar dari antar warga perlu dikembangkan. Para agamawan mesti menjauhkan diri dari sikap triumfalis dan eksklusivitas iman mereka. Kebebasan beragama tidak sama dengan ‘pasar bebas penyiaran agama’, di mana orang bebas menyerang praktik-praktik keagamaan lain (hal. 238). Untuk itu perlu pencerahan dalam memandang agama-agama lain. pemeluk agama lain bukan sebagai objek fobia. Demokrasi dan media perlu membuat masyarakat berani terbuka dan jujur. Dari sinilah agama dibawa ke nalar publik. Upaya untuk mewujudkan hal itu adalah dengan memperdamaikan filsafat dan teologi sebagaimana dikerjakan oleh Imanuel Kant. Ia melakukan demarkasi antara filsafat dan teologi, yaitu model agnostik yang menjaga batas-batas antara nalar dan iman dari sisi nalar. Dari situ ditemukan bahwa teori-teori politik modern tidak dapat dipisahkan dari teologi. Teori-teori politik modern (teori kontrak – Hobbes, Locke, Rousseau, dll), mengandung asumsi-asumsi teologis tertentu (hal. 248). Filsafat dan sains berperan dalam mengusir daya ‘sihir’ dari alam, dalam diri manusia dan masyarakat. Contoh pola ini adalah konsep tentang kejahatan (*evil*). Kejahatan dalam teologi dikaitkan dengan konsep dosa (*sin*), yakni pemberontakan manusia pada Allah. Dari mana konsep itu? Dari Alkitab. Hanya manusia yang beragama menahami hal itu. Sementara kalangan tidak beragama menyebut dosa itu sebagai kesalahan (*guilt*). Dalam diskursus filsafat (etika), dosa direduksi pada kesalahan (moral) dan bahkan – dalam kriminologi – *crime* (hukum) atau pelanggaran hukum positif. Pergeseran makna dari *sin* menuju *crime* ini menghilangkan ciri misterius ‘sihir’ dalam konsep *sin* sedemikian sehingga yang tersisa adalah hal yang dapat dijelaskan secara rasional bahkan teknis – birokratis, yaitu pidana (hal. 250). Konsep itu merugikan konsep teologis karena makna *sin* ter-reduksi. Namun secara luas, konsep-konsep teologis itu tidak kehilangan makna hakikinya (*an-sich*), melainkan makna publiknya, karena secara privat konsep-konsep itu tetap bermakna. Dengan demikian, konsep keselamatan dapat diterima juga oleh orang tak percaya (hal. 251). Dan dewasa ini kita sudah menikmati banyak hasil dari proses sekularisasi konsep-konsep teologis itu, khususnya dalam filsafat politik, dapat dilibati oleh kelompok-kelompok dari berbagai kepercayaan. Konsep hak-hak asasi manusia sekarang dapat diterima hampir semua negara dan agama.

Konsep itu berasal dari pemahaman tentang manusia sebagai citra Allah (*imago Dei*). Selain HAM, konsep-konsep lain yang berasal dari warisan iman Yahudi – Kristen adalah konsep person, individu, moralitas, komunitas etis, suara hati, bahkan kebebasan dan emansipasi. Karena itu dapat dipahami bahwa tumbuhnya filsafat Barat modern sesungguhnya adalah Kekristenan Barat dengan berbagai pandangan teologisnya (hal. 252).

Untuk mendalami bagaimana dialektika filsafat – teologi yang berdampak pada ruang publik (politik dan demokrasi), kita dapat melihat gagasan-gagasan para filsuf seperti Imanuel Kant dan model agnostik. Ia mengajak menggunakan nalar, hukum moral dan karya penciptaan Allah (hal. 255). Hegel dan model metafisis. Ia merekonstruksi tradisi iman dengan menyerapnya ke dalam rasionalitas. Model ini disebut sebagai model metafisis (hal. 263). Kiekgard dan model eksistensial. Ia membiarkan nalar menyerah pada iman. Nalar dibiarkan berjuang dengan kekuatannya sendiri, sedemikian rupa sehingga nalar, menemui batas-batasnya sendiri dan menyerah pada sesuatu yang lain darinya, yaitu iman.

Ketiga model rekonstruksi itu menurut Budi Hardiman merupakan bukti kuat tentang bagaimana filsafat Barat modern memiliki kaitan erat dengan teologi dan iman Kristiani. Habermas menyebut bahwa sumbangan para filsuf untuk hidup bersama yang lebih baik merupakan warisan tradisi Yahudi – Kristiani yang mengajarkan cinta kasih, keadilan, dan harapan akan kerajaan Allah sebagai hal-hal yang berhubungan langsung dengan sejarah keselamatan (hal. 271). Dari sanalah lahir “filsafat konstruktif”. Inti dari filsafat konstruktif pandangan teologi Kristen dibawa ke ruang publik, kesediaan umat terus belajar dari kepelbagian, ‘menakar’ agama untuk politik, menemukan unsur dasarnya pengalaman religius dan mengembangkan filsafat dalam batas-batas nalar dan iman (hal. 272-274).

Tanggapan

Buku ini relevan untuk hidup kita masa kini. Sekalipun kajian filsafat dari Franky Budi Hardiman ini rumit, namun ketika

kita mau membaca hingga tuntas, kita menemukan mutiara-mutiara hikmat dari dalam buku ini.

Di bagian awal buku ini Budi Hardiman menyebut bahwa demokratisasi tidak dapat dilepaskan dari agama, karena sebagian, bahkan sebagian besar *demos* (rakyat) adalah orang-orang beragama yang harus diperhitungkan dalam *kratos* (kekuasaan, pemerintahan). Setiap warganegara hidup dalam nilai-nilai dan nilai-nilai itu sebagian besar didapat dari imannya pada Yang Ilahi. Setelah membaca buku ini, ada tiga catatan saya pada buku ini.

Pertama Budi Hardiman belum mengkaji secara eksplisit pilar-pilar demokrasi sebagai indikator sebuah negeri berjalan dengan baik (secara implisit hal itu bisa dijumpai dalam buku ini). Saya mengutip tulisan J. Kristiyadi yang menyebut terdapat sepuluh pilar demokrasi sebagai berikut (1) kedaulatan rakyat; (2) pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah; (3) kekuasaan mayoritas; (4) jaminan hak-hak minoritas; (5) jaminan hak-hak asasi manusia; (6) persamaan di depan hukum; (7) proses hukum berkeadilan; (8) pembatasan kekuasaan melalui konstitusi; (9) pluralisme sosial, ekonomi dan politik dan (10) pengembangan nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat. Dalam pelaksanaan pilar demokrasi, peran negara dan partisipasi warganegara mutlak diperukan (J. Kristiyadi, dalam A. Ubaedillah, 2015). Bagi wargagereja, partisipasi di ruang demokrasi dilakukan dengan menghayati ajaran Calvin. Calvin menegaskan bahwa antara ke-duanya ada pemisahan namun tidak terpisah. Tidak ada subordinasi atau separasai total namun koordinasi. Koordinasi antara gereja dan negara didasari pada pandangan teologis bahwa ke-duanya memperoleh wewenang dari Allah yang satu bagi dunia yang satu dan kemanusiaan yang satu (Eka Darmaputera, 2005). Di sini, gereja mengakui eksistensi dan fungsi negara sebagai alat Allah sekaligus kritis terhadapnya. Fungsi dari sikap kritis adalah dengan maksud masing-masing menjalankan fungsinya dengan baik. Dengan demikian, warga gereja mesti berpartisipasi di ruang publik agar turut serta mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah.

Kedua, bila ke depan terbit buku serupa (demokrasi dalam kajian filsafat sesuai bidangnya), F. Budi Hardiman bisa mengulas konteks keindonesiaan secara lebih mendalam. Pada bagian post-sekular, kajian filsafat Pancasila bisa diperdalam agar kita menemukan nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan demokrasi Indonesia. Mengapa membahas Pancasila itu perlu? Sebagaimana disebut dalam tulisan bahwa sebuah “bangsa” merupakan *identity in the making*, demikian juga dengan Indonesia. Tarik – menarik ideologi terjadi sejak bangsa ini didirikan. Kita bersyukur bahwa founding father RI memilih jalan Pancasila sebagai dasar bernegara. Selama 73 tahun, Pancasila telah menjadi fungsi integratif dan menjadikan bangsa Indonesia yang plural ini menyatu. Jika Pancasila dilecehkan, direndahkan dan diperlakukan seperti kawanan domba di padang, maka dayanya melemah. Pelemahan Pancasila sebagai ideologi menjadikan bangsa Indonesia kehilangan arah bersama sebagai bangsa.

Ketiga, dari tulisan Budi Hardiman ini kita diajak untuk terus belajar dengan semangat cinta kasih. Cinta merupakan kekuatan besar untuk mewujudkan perubahan ke arah hidup yang lebih baik. Cinta menjauhkan diri dari prasangka dan membuka diri untuk menerima kepelbagian sebagai sebuah rahmat. Cinta menumbuhkan kekuatan untuk menalar secara jujur.

Wisma Kanugrahan, 19 Juli 2018



PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGADERAN LPP SINODE TAHUN 2018

1. Pengadaan Bahan Pembinaan Pengaderan

1) Buku Masa Pentakosta 2018

Buku Pentakosta 2018 bertema “Pewarta Kasih Allah” (Indonesia), “Dados Juru Wartaning Katresnanipun Allah” (Jawa). Proses pembuatan dan pengiriman buku berjalan dengan baik. Mulai tahun 2018 ini soft file buku masa raya LPP Sinode telah dapat diunduh melalui website LPP Sinode dengan alamat lpps.or.id.

2) Buku Bulan Keluarga 2018

Buku Bulan Keluarga 2018 bertema “Keluarga Pemberi Harapan” (Indonesia), “Brayat Pangasung Pangajeng-ajeng” (Jawa). Pengiriman buku berjalan dengan baik, mulai tahun 2018 ini soft file buku masa raya LPP Sinode telah dapat diunduh melalui website LPP Sinode dengan alamat lpps.or.id.

3) Buku Masa Adven – Natal 2018

Buku MAN 2018 bertema “Damai Sejahtera Allah di Bumi Pancasila” (Indonesia), “Tentrem Rahayuning Allah ing Bumi Pancasila” (Jawa). Buku MAN 2018 sudah dikirimkan ke Gereja-gereja dan jemat-jemaat baik melalui soft copy maupun buku. Mulai tahun 2018 ini soft file buku masa raya LPP Sinode telah dapat diunduh melalui website LPP Sinode dengan alamat lpps.or.id.

4) Buku Masa Paska 2019

Buku Masa Paska 2019 bertema “Bangkit Bagi Semua” (Indonesia). *Soft file* buku ini telah dapat diunduh melalui website LPP Sinode. Buku ini rencananya akan dikirimkan pada pertengahan Januari 2019.

2. Pelatihan, Kursus, Semiloka, dan Lokakarya

1) Semiloka Pelayan Kantor Gereja

Semiloka ini telah terlaksana sesuai dengan rencana yakni tanggal 8-9 Januari 2018, dan merupakan semiloka pelayan kantor gereja angkatan ke-6. Jumlah Peserta yang sedikit antara lain karena memang program ini sudah angkatan ke-6, juga tanggal kegiatan yang terlalu awal dibulan Januari sehingga banyak gereja yang masih disibukkan dengan kegiatan setelah natal dan tahun baru. Semiloka ini diikuti oleh 8 orang peserta (4 orang dari GKI dan 4 orang dari GKJ)

2) Semiloka Koster Gereja

Semiloka ini dilaksanakan pada tanggal 16-17 Januari 2018 sesuai dengan rencana. Peserta semakin memahami profesionalitas bekerja sebagai koster dan semakin termotivasi untuk memberikan rasa nyaman bagi jemaat dalam beribadah. Sharing dengan sesama koster lain juga menjadi salah satu hal menarik dalam acara ini. Peserta yang hadir dalam semiloka ini 33 orang (23 orang dari GKJ dan 10 orang dari GKI)

3) Semiloka Pelayan Katekisasi

Semiloka Pelayan Katekisasi telah terlaksana pada tanggal 9-10 Februari 2018. Peserta antusias untuk mengikuti sampai acara berakhir. Evaluasi dari peserta supaya materi dapat dibagikan di awal kegiatan. Ada usulan dari peserta supaya pemateri dalam satu sesi bisa dilakukan oleh dua orang sehingga dialogis dan lebih menarik. Jumlah peserta yang hadir dalam semiloka ini 44 orang (37 GKJ dan 7 GKI). Semiloka Pelayan Katekisasi ini dilaksanakan dua Gelombang, gelombang ke-2 dilaksanakan pada tanggal 23-24 Maret 2018.

Jumlah peserta yang hadir pada gelombang ke-2 14 dari GKJ dan 2 dari GKI.

4) Studi Pembinaan Warga Gereja I

Studi PWG pertama ini berjalan sesuai dengan rencana yakni tanggal 23 Februari 2018. Studi PWG pertama ini mengambil tema “Misteri Kematian”, dengan nara sumber pdt. Hendry Sendjdaja dari UKDW dan Bp. Siswanto dari UNIKA Soegijo Pranoto Semarang, karena peserta banyak (91 orang) acara dilaksanakan di GKJ Samironobaru. Peserta antusias untuk mengikuti acara sampai akhir. Pertanyaan mengenai misteri kematian memang tidak terjawab secara gamblang karena memang bukan itu yang menjadi tujuan diselenggarakan acara ini namun lebih kepada belajar bersama memahami kematian dalam perspektif Kristiani dan Psikologis.

5) Telaah Buku 1

Telaah buku pertama berjalan sesuai dengan rencana yakni tanggal 2 Maret 2018, buku yang ditelaah adalah “Kekasih Allah, Narasi perempuan Pedhotan di Gunung Kemukus”. Karya Romo Mutiara Andalas, penerbit SDU Press. Penelaah Pdt. Addi Soselia Patriabara. Jumlah peserta yang hadir 27 orang dengan perincian 5 orang utusan GKI dan 22 orang dari GKJ.

6) Semiloka Doa

Semiloka ini telah terlaksana sesuai dengan rencana yakni tanggal 16-17 Maret 2018. Peserta antusias mengikuti kegiatan semiloka doa dari awal acara sampai akhir acara. Peserta mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai ragam cara berdoa. Jumlah peserta yang hadir 10 orang dari GKJ dan 17 orang dari GKI.

7) Semiloka Diaconia Transformatif

Semiloka Diaconia Transformatif terlaksana sesuai dengan rencana yakni tanggal 20-21 April 2018. Acara berjalan dengan baik, peserta antusias mengikuti setiap sesi yang disampaikan. Peserta yang hadir 41 orang terdiri dari 32 GKJ dan 9 GKI.

8) Semiloka Digital Ministry

Semiloka Digital Ministry terlaksana pada tanggal 18-19 Mei 2018 mundur dari rencana awal, hal ini disebabkan karena nara sumber dari Sesi Digital yakni Bp. Budi Susanto dari UKDW tidak bisa pada tanggal yang telah ditentukan LPP Sinode. Saat ini sudah dibentuk grup WA Digital Ministry, beberapa peserta bersedia untuk menjadi volunteer mengembangkan website LPP Sinode didukung oleh Bp. Budi Susanto dari UKDW. Jumlah peserta 26 orang terdiri dari 21 orang dari GKJ dan 5 orang dari GKI.

9) Pembinaan Sehari (binari) *Contemporary Worship*

Binari Contemporary Worship for Youth terlaksana pada tanggal 26 Mei 2018 sesuai dengan rencana, minat warga jemaat untuk mengikuti sebenarnya besar namun karena tempat yang tidak memungkinkan sehingga beberapa gereja yang mendaftar harus kami tolak. Dalam pelaksanaannya nama Binari dirubah menjadi Binari Contemporary Worship dengan pemahaman bahwa bukan hanya anak muda yang akan terlibat dalam Contemporary Worship. Acara ini dihadiri oleh 54 orang terdiri dari 43 orang GKJ dan 11 GKI.

10) Semiloka Pelayan Kantor Gereja, Klasis, dan Sinode

Kegiatan ini telah terlaksana pada tanggal 1-2 Juni 2018 dengan diikuti oleh 13 orang peserta (11 GKJ dan 2 GKI) Sedikitnya jumlah peserta disinyalir karena pelaksanaan pada hari libur, sehingga banyak gereja-gereja yang juga sudah mengadakan kegiatan sendiri. Selain itu tema Pancasila sudah membosankan dan dirasa tidak menarik oleh gereja-gereja. Kegiatan ini berjalan atas kerjasama dengan Jurusan PPKn, FKIP, UKSW Salatiga. Nama sekolah Pancasila pada pelaksanaannya dirubah menjadi Kursus Pancasila, karena kata kursus lebih mudah dipahami oleh jemaat dan nama tersebut juga merupakan usulan para narasumber dari Jurusan PPKn UKSW.

11) Semiloka Pelayan Anak Tahap Menengah

Semiloka Pelayan Anak Tahap Menengah telah terlaksana 13-14 Juli 2018 sesuai dengan rencana. Acara berjalan dengan baik. Peserta antusias dan mendapatkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan. Dalam kegiatan ini diberikan subsidi kepada satu orang peserta. Jumlah peserta yang hadir 32 orang terdiri dari 27 orang dari GKJ dan 5 orang GKI.

12) Telaah buku-2

Telaah buku 2 telah terlaksana pada tanggal 20 Juli 2018. Buku yang ditelaah adalah “Demokrasi dan Sentimentalitas, Dari “Bangsa Setan-Setan”, Radikalisme Agama Sampai Post-Sekularisasi”. Karya Dr. Franky Budi Hardiman, dan diterbitkan oleh Kanisius. Justru karena pesertanya tidak terlalu banyak, maka percakapan di dalam acara tersebut sangat mendalam. Beberapa peserta menyayangkan mengapa tidak banyak gereja yang mengutus ke acara ini padahal isu yang dibicarakan aktual dan sangat berguna bagi jemaat dalam menghadapi situasi saat ini. Jumlah peserta yang hadir 16 orang terdiri dari 13 orang dari GKJ dan 3 orang dari GKI.

13) Binari Gereja Ramah Anak

Binari “Gereja Ramah Anak” telah terlaksana pada tanggal 28 Juli 2018. Karena peserta banyak (124 orang terdiri dari 98 GKJ dan 26 GKI) sehingga pelaksanaannya di GKJ Samironobaru. Subsidi dana kontribusi peserta diberikan untuk 2 orang peserta. Peserta banyak karena topik ini termasuk topik baru dan menarik. Peserta merasakan memperoleh insight baru terkait dengan kehidupan menggereja.

14) Binari Keluarga dan Kesehatan Mental

Program ini akhirnya dikerjasamakan dengan API (Asosiasi Pastoral Indonesia) Wilayah DIY-Jateng dalam bentuk Seminar dan Workshop “Penanganan Kerasukan”. Narasumber: Pdt. Robert Setio (UKDW) dan Bp. Siswanto (Unika Semarang) Acara berjalan

dengan baik. Sebagian besar peserta merasa mendapatkan ilmu yang diharapkan. Acara ini telah dilaksanakan pada tanggal 21 dan 22 September 2018 dengan jumlah peserta seminar 60 orang dan peserta workshop 49 orang.

15) Semiloka Konseling Pastoral

Semiloka Konseling Pastoral telah terlaksana maju dari rencana awal yaitu 26-27 Oktober 2018. Semiloka ini telah dilaksanakan pada tanggal 28-29 September 2018. Acara berjalan dengan baik. Peserta merasakan mendapatkan ilmu yang diharapkan. Jumlah peserta 35 orang terdiri dari 25 GKJ dan 10 dari GKI.

16) Temu Karya Petugas Kemanan dan Ketertiban Gereja

Temu Karya ini terlaksana pada tanggal 8-9 Oktober 2018. Program ini bukan program yang telah direncanakan pada awal tahun anggaran. Program ini muncul karena kegelisahan dan kekuatiran kondisi gereja di zaman seperti sekarang ini. Juga dalam rangka mengganti program-program yang batal dilaksanakan. Acara ini berjalan dengan baik. Para peserta mendapatkan pengetahuan dan inspirasi, baik dari fasilitator maupun dari sharing peserta. Jumlah peserta yang hadir 20 orang terdiri dari 13 GKJ dan 7 GKI.

17) Semiloka PA Kombin

Program ini dilaksanakan dalam bentuk Pembinaan Sehari (Binari) PA Kombin. Telah terlaksana pada tanggal 10 November 2018 dengan diikuti oleh 45 peserta terdiri dari 28 GKJ dan 17 GKI. Dalam kegiatan ini peserta dibagikan satu buku Kombin terbitan LPP Sinode.

18) Telaah buku 3

Telaah buku ke-3 telah terlaksana sesuai rencana yakni tanggal 16 November 2018. Buku yang ditelaah adalah “Altar dan Latar, Spiritualitas Diaconia Profetik” Karya Josef P. Widyatmaja. Diterbitkan oleh penerbit GKI. Penelaah pada telaah buku 3 ini adalah Pdt. Jozef M.N

Hehanussa dan Pdt. Em. Widi Artanto. Epilog disampaikan oleh Pdt. Rudiyanto dari STT Abdiel Semarang. Acara telaah buku ini sekaligus dalam rangka launching buku tersebut.

19) Studi PWG ke-2

Studi PWG ke-2 telah terlaksana pada tanggal 24 November 2018. Studi PWG ke-2 mengambil Topik “Gereja Peduli KDRT” dengan Fasilitator: Sdri. Arnita Ernauli Marbun (Aktivis gereja dan praktisi di Rifka Annisa Women’s crisis centre Yogyakarta) dan Pdt. Murtini Hehanussa. Acara berjalan dengan baik dengan diikuti oleh 43 peserta terdiri dari 36 orang dari GKJ dan 7 orang dari GKI.

3. Layanan LPP Sinode kepada Gereja GKJ/Jemaat GKI SW Jateng dan Klasis GKJ serta GKI SW Jateng

- a) Layanan Jemaat/Gereja setempat dan Klasis GKJ – GKI SW Jateng sebanyak 79 kali.
- b) Layanan Sinode GKJ dilaksanakan 1 kali.
- c) Layanan Sinode GKI SW Jateng dilaksanakan 2 kali.
- d) Layanan Lembaga Gerejawi GKJ dan GKI SW Jateng dilaksanakan sebanyak 4 kali.
- e) Layanan Gereja Non GKJ dan GKI SW Jateng sebanyak 4 kali.
- f) Layanan Lembaga Gerejawi Non- GKJ dan GKI SW Jateng dilakukan sebanyak 1 kali.
- g) Layanan Lembaga Non Gerejawi dilaksanakan sebanyak 1 kali.



MAU TAHU PROGRAM LPP SINODE 2019?



**Ayo dukung dalam doa,
dana dan ikutilah program-program LPP Sinode
berikut ini!!**

Program/Kegiatan	Pelaksanaan
Semiloka PJ Apresiatif	25-26 Januari
Semiloka Pendampingan Keluarga dengan pasien Kanker	22-23 Februari
Semiloka Spritualitas Padang Gurun	22-23 Maret
Semiloka Liturgical Dancing	24-25 Mei
Pembinaan untuk Profesi perangkat Pemerintah	19-20 Juli
Semiloka Gereja adalah ruang publik	30-31 Agustus
Binari Analisis Sosial	28 September
Semiloka Katekisasi Bina Pranikah	18-19 Oktober
Binari Pengurus Wilayah	23 November
Telaah Buku 1	5 April
Telaah Buku 2	6 September
Studi PWG 1	4 Mei
Studi PWG 2	2 November



**Ingin mendapat inspirasi
untuk kegiatan Masa Raya dan
katekisasi lanjutan di
Gereja/Jemaat Anda?**

Milikilah buku-buku ini...!!

Buruan pesan....

- *Buku Masa Raya Paska 2019*
- *Buku Masa Raya Pentakosa 2019*
- *Buku Bulan Keluarga 2019*
- *Buku Masa Adven-Natal 2019*
- *Buku Kombin Pengajaran (Trinitas, Yesus Kristus, Roh Kudus, dll....)*
- *Buku Kombin tentang Gereja (Hakikat Gereja, Misi Gereja, Organisasi Gereja, dll....)*

**Untuk informasi lebih lanjut, silakan
hubungi kami di alamat: Samironobaru
No. 77 Kompleks LPP Sinode Yogyakarta
55281. Telp.: 0274-514721;
Email: sekretariatlppsinode@gmail.com;
Fax.: 0274 - 543001; atau
whatsapp. 087839547786.**



**Ada masalah biaya kontribusi untuk acara tersebut?
Jangan jadi kendala...!!**

**Anda berminat untuk belajar dan mengembangkan diri? Silakan
mendaftar dan ikutilah acara tersebut!!**

**Bagi Saudara-saudara yang tergerak untuk mendukung
saudara-saudara kita terutama yang dari desa-desa yang
punya kerinduan besar untuk belajar namun terkendala dana,
silakan memberi dukungan dalam "*Sister Church Program:
Training and Development for All*"
melalui rekening kami:**

**Rek. BRI Tiro no. 0029-01-000409-30-9 a.n. LPP Sinode
Rek. BCA no. 4560810836 a.n. Dra. Bening Hadilinatih**

***Mari kita bergandengan
tangan mengerjakan
pekerjaan Tuhan. Soli Deo
Gloria!!***



Para Pelayan Tuhan di LPP Sinode



1. Pengurus LPP Sinode Periode 1 Januari 2017 – 31 Desember 2020:

Ketua : Pdt. Mungki Sasmita
Sekretaris : Pdt. Sundoyo
Bendahara : Ibu Bening Hadilinatih
Anggota : Pdt. Tabita Kartika Christiani
Ibu Erni Ekawati
Ibu Susiyanti
Bp. Sribugo Suratmo
KRT Thomas Haryonagoro
Pdt. Windu P. Hadisasono
Pdt. Darmanto Lemuel

Sekilas profil pengurus LPP Sinode.

1. Pdt. Mungki Sasmita, S.Th., MA. Beliau adalah Pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Sangkrah, Solo. Selain menjadi pengurus di LPP Sinode Pdt. Mungki juga menjabat sebagai:
 - 1) Ketua 1, Yayasan Sekolah Kristen (YSK) Widya Wacana, Surakarta
 - 2) Anggota pengurus Yayasan Mardiko Indonesia
 - 3) Anggota Komisi Tata Gereja (Komtager)
2. Pdt. Sundoyo, S.Si., MBA. Beliau adalah Pendeta jemaat GKJ Brayat Kinasih Yogyakarta. Selain sebagai pengurus di LPP Sinode beliau juga menjabat sebagai

Ketua Bidang Pengembangan Kepemimpinan Sinode XXVII GKJ.

3. Dr. Bening Hadilinatih, M.Si adalah warga GKJ Gondokusuman, beliau saat ini aktif mengajar di Universitas Proklamasi sebagai dosen pada Fakultas ISIPOL.
4. Pdt. Tabita Kartika Christiani, Ph.D. Beliau adalah Pendeta Tugas Khusus Sinode Wilayah (PTKSW) GKI SW Jateng untuk menjadi dosen di Fakultas Teologi UKDW. Selain pengurus LPP Sinode juga pengurus DIAN/Interfidei.
5. Erni Ekawati, Ph.D, CA. beliau adalah Dosen Fakultas Bisnis UKDW dan anggota jemat GKI Gejayan.
6. Susiyanti, S.H. adalah anggota jemaat di GKJ Sabda Mulya, Surakarta. Pekerjaan: Advokat/Pengacara. Selain sebagai pengurus di LPP Sinode beliau adalah:
 - 1) Sekretaris YLPHS (Yayasan Lembaga Pelayanan Hukum Salatiga)
 - 2) Bendahara di Yayasan Pendidikan Bina Kasih Kartasura,
 - 3) Bendahara. di Perhimpunan Advokat Indonesia cabang Surakarta
7. Drs. Sribugo Suratmo Psikolog. Beliau adalah warga GKJ Joglo Jakarta, saat ini bekerja sebagai Kepala Divisi Corporate Communication PT. Mayora Indah Tbk. Selain sebagai pengurus di LPP Sinode beliau juga menjadi pengurus di:
 - 1) Gabungan Pengusaha Makanan & Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) sbg. Wakil Ketua Umum.
 - 2) Asosiasi Industri Roti Biskuit dan Mie Instan (AROBIM) Sebagai Ketua Umum.

8. KRT Thomas Haryonagoro, beliau adalah anggota jemaat GKI Ngupasan dan aktif di beberapa lembaga antara lain:
 - 1) Pengurus LPWS GKI Sinwil Jateng
 - 2) Direktur Utama PT. Mitra Agung Sejahtera
 - 3) Ketua Pengurus Yayasan Wisma Sejahtera
 - 4) Anggota Dep. Penatalayanan Sinwil GKI Jateng
 - 5) Pembina YAKKUM
 - 6) Direktur V Thom Restaurant
9. Pdt. Windu P. Hadisasono, M.Th., beliau melayani sebagai Pendeta di GKJ Kertanegara, Semarang. Selain di LPP Sinode beliau juga menjadi pengurus di:
 - 1) Bapelsin XXVII sebagai Ketua Bidang Keesaan
 - 2) Bapelklas XIV Klasis Semarang Selatan sebagai Ketua Bidang PWG.
10. Pdt. Darmanto Lemuel S.Th. M.Min. Pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Temanggung dan anggota BPMK GKI Klasis Magelang.

2. Direktur:

Pdt. Wisnu Sapto Nugroho (1 Juni 2015-31 Mei 2019)

3. Pelaksana Pembinaan dan Pengaderan:

- 1) Pdt. Wisnu Sapto Nugroho (PTKSW GKI SW Jateng sejak 2008)
- 2) Pdt. Addi Soselia Patriabara (PTKSW GKI SW Jateng, sejak 2011)
- 3) Pdt. Murtini Hehanussa (PPK Sinode GKJ, sejak 2012)

4. Staf Administrasi

- 1) Admisitrasi 1: Ambar Widyastuti Sabatiningsih
- 2) Adminstrasi 2: Budi Setyo Kuncoro

5. Pramubakti

- 1) Andi Septiyanto

- 2) Janu Anggriaga
- 3) Irwan Susanto Tri Setyo Nugroho
- 4) Arif Budi Prakoso

6. Petugas Keamanan

- 1) Sumaryanto
- 2) Yohanes Eko Supriyadi
- 3) Andi Seputro
- 4) Basuki Winardi

7. Petugas Kebersihan Kebun

- 1) Yosef Wiyatno
- 2) Sugiharto



WISMA, AULA DAN RUANG RAPAT



**Butuh penginapan bersih
dan murah di Jogja?**



**Anda mau *meeting*?
Bidston di Jogja?
Arisan?
Atau acara lainnya?**

Hubungi kami:



0274-514721

087839547786

Sebagai sebuah lembaga nirlaba, LPP Sinode yang fokus dalam bidang pembinaan dan pengaderan majelis maupun warga gereja/jemaat GKJ serta GKI SW Jateng, LPP Sinode memiliki penginapan, aula, dan ruang rapat yang biasa digunakan sebagai fasilitas pembinaan dan pengaderan.

Selain memfasilitasi peserta pembinaan dan pengaderan, dalam rangka pemeliharaan dan perawatan fasilitas tersebut maka wisma, aula, maupun ruang rapat juga disewakan kepada masyarakat umum.

Berikut ini adalah gambaran mengenai wisma dan ruang rapat LPP Sinode yang dapat disewakan:

1. Aula LPP Sinode

Mampu menampung 50 peserta dengan fasilitas 2 buah LCD dan 4 AC.

**2. Ruang Rapat LPP Sinode:****1) Ruang Rapat 1**

Mampu menampung 14 peserta dengan 2 buah AC



2) Ruang Rapat 2

Memiliki kapasitas 24 orang, dengan 2 buah AC dan 1 LCD.

**3) Ruang Rapat 3**

Memiliki kapasitas 10 orang, dengan 1 buah AC.



3. Wisma Paseban 1A

Wisma paseban 1A terdiri dari 7 kamar AC dengan masing-masing kamar mampu menampung 4 orang dan 3 kamar non AC untuk 2 orang.

**4. Wisma Paseban 1B**

Wisma Paseban 1B terdiri dari 3 Kamar AC dengan masing-masing kamar mampu untuk menampung 4 orang dan 1 kamar non AC untuk 2 orang.



5. Wisma Paseban 1C

Wisma paseban 1C terdiri dari 6 kamar dengan masing-masing kamar mampu menampung 2 orang. Masing-masing kamar memiliki kamar mandi dan AC untuk setiap kamarnya.



6. Wisma Paseban 5

Wisma Paseban 5 terdiri dari 2 kamar AC yang masing-masing mampu menampung 4 orang. Dan 1 kamar AC untuk 2 orang.



7. Wisma Paseban 6

Wisma Paseban 6 terdiri dari 1 Kamar AC untuk 2 orang, 1 kamar AC untuk 3 orang, dan 1 kamar AC untuk 4 orang.



**Informasi penyewaan Aula, Ruang rapat maupun Wisma dapat menghubungi kantor LPP Sinode setiap hari di nomor telepon:
0274-514721 atau *whatsapp* di 087839547786**